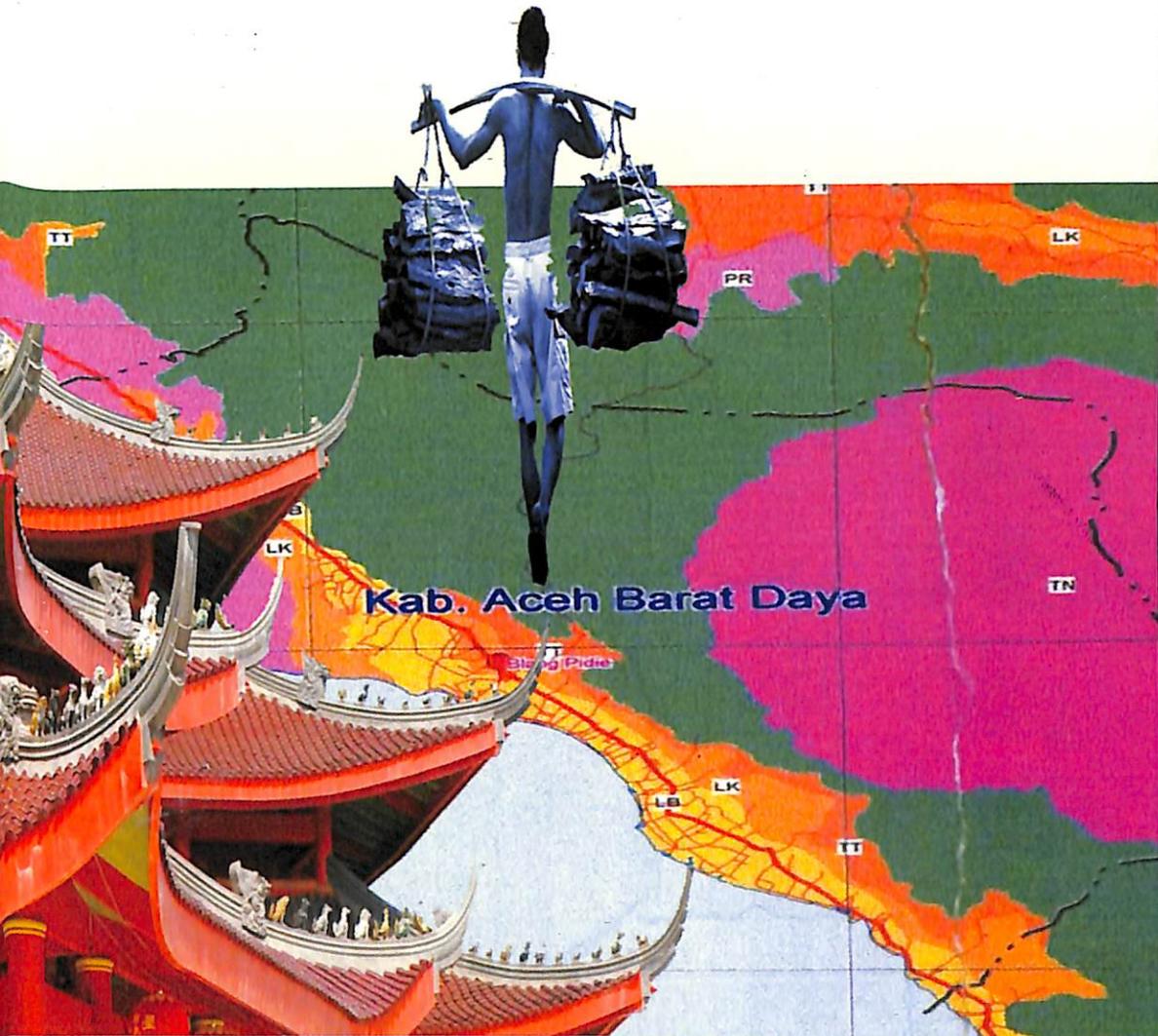


Hasbullah

CINA DALAM LINTAS PERDAGANGAN DI ACEH BARAT DAYA 1900 - 2008



Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata
Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional Banda Aceh
2010

**CINA DALAM LINTAS PERDAGANGAN
DI ACEH BARAT DAYA 1900-2008**

Hasbullah,S.S.

**Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional
Banda Aceh**

**Jl. Twk. Hasyim Banta Muda No. 17 Banda Aceh
Telp/Faks +62651 - 23226**

Banda Aceh 2010

**Cina Dalam Lintas Perdagangan di Aceh Barat Daya/Hasbullah-
Banda Aceh.**

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2010.

vi+129

ISBN: 978-979-9164-81-0

Judul:

Cina Dalam Lintas Perdagangan di Aceh Barat Daya 1900-2008

Hasbullah,SS

Copyrights ©2010

Editor

Prof.Drs.Zakaria Ahmad

Setting

Essy Hermaliza,S.Pd.I

Cover

Lizar Andrian

**Diterbitkan Oleh BPSNT Banda Aceh
Hak Cipta dilindungi Undang – Undang
All rights reserved**

Penerbit

**Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional
Jl. Twk. Hasyim Banta Muda No. 17 Banda Aceh**

Telp/Faks.

+62651 – 23226

[http.www.bpsnt-bandaaceh.com](http://www.bpsnt-bandaaceh.com)

**Perpustakaan Nasional
Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

KATA SAMBUTAN

Penerbitan buku ini merupakan realisasi dari tupoksi BPSNT Banda Aceh yang wilayah kerjanya meliputi provinsi Aceh dan Sumut. Penerbitan buku ini dilaksanakan sebagai wujud kepedulian BPSNT dalam menggali, mensosialisasi, menginventarisasi dan melakukan pengkajian, baik di bidang sejarah maupun budaya. Dalam hal ini kami menyambut baik terbitnya buku Cina Dalam Lintas Perdagangan Di Kabupaten Aceh Barat Daya (1900-2008).

Sebagaimana diketahui permasalahan Cina dalam masyarakat Indonesia merupakan *laten social conflict* yang masih dicari solusi terbaik agar tidak muncul lagi disharmoni di dalam masyarakat. Adanya perbedaan persepsi antara masyarakat lokal dengan kelompok Cina yang bermula dari perbedaan kesejahteraan dan nilai-nilai kultural yang sering menimbulkan benih-benih konflik.

Keberadaan kelompok Cina di Kabupaten Aceh Barat Daya menunjukkan adanya harmonisasi. Hal ini terbukti dengan adanya keberadaan mereka sejak masa kolonial Belanda sampai saat ini. Mereka eksis dalam perdagangan yang memunculkan *trickle effect* dan *multiplier effect* bagi masyarakat Aceh Barat Daya terutama dalam membentuk lintas perdagangan di kota dagang di pesisir barat-selatan Aceh. Meskipun ada riak-riak kecil dalam perjalanan sejarahnya namun tidak membuat gap antara di kelompok pedagang di sana seperti Aceh, Pidie, Aneuk Jamee dengan Cina hingga saat ini.

Kami memberi apresiasi kepada penulis agar terus berkarya dan menyempurnakan kajiannya untuk menggali nilai-nilai luhur bangsa sehingga dapat diambil hikmah dalam melangkah bersama ke masa depan yang lebih baik.

Banda Aceh, Oktober 2010
Kepala BPSNT Banda Aceh,



Djuniat, S.Sos.
NIP. 19570607 197903 1 011

KATA PENGANTAR

Dalam perspektif historis ketika kolonial Belanda berkuasa di Indonesia posisi etnis Cina yang semula berada di level yang rendah, kemudian mendapat posisi yang lebih tinggi daripada penduduk lokal. Dinamika ini membuat etnis Cina di Aceh Barat Daya beralih menjadi pedagang dan peternak. Kesempatan dan keuletan dalam mengambil setiap peluang dan kesempatan membuat mereka mampu mempertahankan diri di kota ini hingga Jepang datang dan Belanda menyingkir ke perbatasan Sumatera Utara.

Perdagangan Cina pada awalnya berkembang ketika Belanda melakukan kapitalisasi dengan membuka kesempatan kerja baru seperti pembukaan "*plantation*" sawit dan karet di Seumayam dan Seuneuam. Selain keuletan, ketekunan dan keluwesan dalam berdagang, mereka juga luwes dalam menyikapi dinamika politik, birokrasi dan penguasa yang menjadikan mereka bertahan di daerah "*Breueh Sigeupai*" ini. Hal ini ternyata memberikan *trickle down effect* dan *multiplier effect* bagi lintas perdagangan dan menumbuhkan kultur *entrepreneurship* bagi pedagang lokal dari waktu ke waktu.

Peranan Cina dalam lintas perdagangan di Aceh Barat Daya tidak dapat disangkal secara historis. Mereka memiliki kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan dan perkembangan sektor perdagangan meskipun tanpa mengabaikan keterlibatan kelompok lokal seperti pedagang Aceh, Pidie, dan Aneuk Jamee yang juga memiliki kultur perdagangan yang hampir sama.

Akhirnya, kami menyadari buku ini masih jauh dari kesempurnaan, namun semoga menjadi awal yang baik dalam melengkapi referensi mengenai sejarah lokal Aceh Barat Daya, khususnya menyangkut keberadaan etnis Cina dalam lintas perdagangan pada periode dimaksud.

Banda Aceh, Oktober 2010
Penulis,

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	16
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	19
D. Ruang Lingkup Kajian.....	19
E. Metode Penelitian.....	21
F. Sistematika Penelitian.....	23
BAB II. PROFIL DAERAH DAN SEJARAH KENEGERIAN ACEH BARAT DAYA.....	25
A. Deskripsi Wilayah	25
B. Sejarah Kenegerian.....	27
C. Penyebaran Cina	54
BAB III. KONDISI SOSIAL BUDAYA ACEH BARAT DAYA..	59
A. Keadaan Etnis Cina	59
B. Keadaan Etnis Lainnya.....	65
C. Hubungan Antara Etnis Cina dan Etnis Lainnya.....	71
BAB IV. CINA DALAM LINTAS PERDAGANGAN DI ACEH BARAT DAYA (1900-2008)	77
A. Perdagangan Era Maritim (1900-1986)	82
B. Perdagangan Era Daratan (1986-2002)	92
C. Perdagangan Kontemporer (2002-2008)	96
BAB V. PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	125

DAFTAR PUSTAKA.....	121
A. Kebijakan Pemerintah.....	121
B. Buku, Naskah dan Makalah	122
C. Surat Kabar/Majalah	127
D. Daftar Informan	127

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Analisa terhadap munculnya aktivitas perdagangan pada masa lalu tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat dari fenomena yang tampak. Berbagai faktor historis menjadi penyebab munculnya perdagangan suatu kelompok tertentu atau orang asing di suatu tempat di luar komunitasnya yang sangat berbeda kultur maupun sistem kepercayaannya. Keberadaan kelompok pedagang minoritas Cina¹ di Aceh Barat Daya telah mewarnai sejarah perdagangan di kota yang dijuluki sebagai kota dagang di pesisir barat-selatan Aceh ini.

Keberadaan pedagang Cina di kota Blangpidie² dalam lintas sejarah perdagangan di Aceh Barat Daya, menarik diteliti untuk melihat eksistensitas mereka dalam percaturan perdagangan di sana hingga saat ini. Sejarah juga membuktikan bahwa kemampuan, keuletan,

¹Istilah Cina digunakan secara resmi dalam penulisan sejarah untuk menggantikan istilah Tionghoa sejak diadakan seminar Angkatan Darat di Bandung pada bulan Agustus 1966, melalui Peraturan Pemerintah berupa *Surat Edaran Presidium Kabinet No.SE-06/Pres Kab/6/1967*.

²Blangpidie pada masa sebelum, masa kolonial hingga masa menjelang kemerdekaan masih dikenal dengan nama Kuta Batee.

ketekunan dan daya saing pedagang Cina dalam bidang perdagangan dinilai mampu memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan kota perdagangan dan lintas perekonomiannya. Akan tetapi, di sisi lain kelompok minoritas ini seringkali menjadi sasaran pelampiasan kekesalan dari kelompok mayoritas yang dipicu oleh kesenjangan sosial dan perekonomian di antara mereka.

Di balik itu semua, kesuksesan keuletan dalam lintas perdagangan menyebabkan kelompok minoritas ini menjadi salah satu lokomotif bagi pertumbuhan perdagangan dan perekonomian di kota ini. Dominasi kelompok minoritas Cina dalam lintas perdagangan memberi kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di daerah ini dengan tidak mengabaikan sama sekali peranan etnis lainnya seperti Aceh (Aceh Besar dan Pidie), serta Aneuk Jamee yang juga memiliki tradisi perdagangan yang hampir sama dalam lintas perdagangan di Aceh Barat Daya.

Sejarah kesuksesan kaum Chung Hua³ dari negara Tiongkok tidaklah terjadi dalam waktu yang singkat tetapi

³ Chung Hua dan Tiongkok berarti Negeri Tengah, istilah ini muncul, karena orang-orang Cina menganggap negeri mereka sebagai Pusat Dunia atau Sumber Peradaban Dunia. Lihat dalam Charles

melalui proses historis yang panjang di tanah perantauan. Dalam lintas historis, kontak-kontak dengan orang Cina di Aceh Barat Daya telah dimulai sejak kolonial Belanda memberi ruang bagi kelompok ini dalam mengembangkan perdagangannya di daerah ini. Pada mulanya aktivitas perdagangan mereka masih sangat kecil dan komunitas mereka pun masih sangat sedikit.

Di Aceh penyebaran Cina terdapat di beberapa kota seperti di Banda Aceh, khususnya kawasan Peunayong. Namun mayoritas mereka yang ada di sana berasal dari provinsi Kwangtung yaitu etnis Hakka (Khek), Kong Fu (Kanton), Teochiu dan etnis Hailan dari pulau Hailan. Sedangkan di daerah pesisir barat Aceh, khususnya di kota Meulaboh kabupaten Aceh Barat dan di Aceh Barat Daya khususnya di kota Blangpidie cenderung memiliki relasitas perdagangan dengan kelompok Cina dari Sumatera Utara, seperti Sibolga. Mereka disebutkan berasal dari bagian selatan provinsi Fukien terdiri dari etnis Hokkian, Hokcia,

dan Hinhua. Mereka memiliki bahasa yang berbeda-beda di antara subkultur yang satu dengan yang lainnya.⁴

Mereka merantau meninggalkan negara asalnya akibat kesulitan perekonomian maupun mencari kehidupan yang lebih baik. Daerah asal mereka, sewaktu-waktu merupakan daerah dengan kehidupan yang serba sulit. Di mana alamnya beriklim panas, tanah gersang, berpenduduk padat, serta pergolakan-pergolakan sosial yang sering terjadi.⁵

Keberhasilan mereka di tanah perantauan karena menekankan sistem nilai, rajin, hemat, pengendalian diri, semangat pantang menyerah dan terampil. Selain itu mereka memiliki organisasi sosial yang mudah sekali digunakan dan disesuaikan. Hal inilah yang menyebabkan mereka berhasil dalam perekonomian di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam sedangkan penduduk asli sama sekali berbeda orientasinya.⁶

⁴Puspa Vasanty, "Kebudayaan Orang Tionghoa Indonesia", dalam Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jambatan, 1976), hlm.346.

⁵Siswono Yudhohusodo, *Warga Baru : Kasus Cina di Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Padamu Negri, 1995), hlm.56.

⁶G.William Skinner, "Golongan Minoritas Tionghoa" dalam Mely G.Tan (ed), *Etnis Tionghoa Indoensia Suatu Pembinaan Kesatuan Bangsa*", (Jakarta : PT Gramedia, 1979), hlm.2.

Para imigran Cina membawa kebudayaan sendiri-sendiri dengan perbedaan bahasa. Namun walaupun berbeda dialek, mereka memiliki media komunikasi yang sama dalam ragam bahasa tulisan. Hal ini secara tidak langsung dapat mempersatukan komunitas Cina di perantauan.⁷ Perbedaan asal imigran dari berbagai etnis yang berasal dari provinsi Fukien dan Kwantung juga membedakan penyebaran dan mata pencaharian mereka di perantauan.

Suku Hokkian yang pertama kali datang ke Indonesia, mereka mempunyai kepandaian dalam berdagang. Kepandaian dalam perdagangan ini terjadi selama berabad-abad, karena daerah asalnya merupakan daerah yang penting dalam perdagangan orang Cina di seberang lautan. Kepandaian perdagangan kelompok ini nampak jelas di Indonesia.

Penyebaran mereka terdapat di Indonesia bagian timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur serta pantai barat Sumatera.⁸ Secara umum, penyebaran keturunan Cina di

⁷ Dede Oetomo, "Kemultibahasaan dan Identitas Orang Cina di Indonesia", dalam Jennifer Cushman dan Wang Gungwu, (ed), *Perubahan Identitas Orang Cina di Asia Tenggara*, (Jakarta : Grafiti Press), hlm.131.

⁸Puspa Vasanty, *op.cit.*

Indonesia, yaitu suku Hokkian mendominasi Jawa. Suku Hakka mendominasi Kalimantan Barat. Sedangkan suku Tiochiu tersebar di Sumatra Timur, Riau dan Bangka Belitung.⁹

Keberadaan dan penyebaran pedagang Cina di Aceh Barat Daya adalah warisan kolonial Belanda. Di mana perkembangan mereka di sana ketika itu akibat sistem politik kolonial yang membedakan antara masyarakat lokal dan orang asing.

Kedatangan dan berlangsungnya perdagangan mereka pada awalnya sangat disokong oleh keberadaan tangsi militer Belanda di Kuta Batee, Aceh Barat Daya pada tahun 1900. Sejak saat itu, di sekitar tangsi mulai bermunculan toko-toko pedagang Cina.

Perlakuan khusus dari kolonial Belanda yang menempatkan kedudukan Cina dalam posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk lokal. Perlakuan khusus ini telah menumbuhkan sikap hidup dan perilaku eksklusif yang disertai dengan tumbuhnya kemampuan

⁹J.L.Vleming Jr, *Kongsi dan Spekulasi Jaringan Kerja Bisnis Cina*, hlm.16.

pekonomi mereka yang lebih kuat dibandingkan masyarakat lokal.¹⁰

Dalam penerapan politik *divide et impera*, pemerintah kolonial Belanda menerapkan peraturan yang sedemikian rupa, sehingga selain di sektor perdagangan orang Cina tidak bisa memasuki sektor lain seperti pegawai pemerintah. Sebaliknya masyarakat lokal diberi kesempatan sebagai pegawai pemerintah, namun tidak diberi kesempatan di sektor perdagangan dan perekonomian.

Masyarakat ketika kolonial Belanda berkuasa dibagi menjadi tiga lapisan menurut rasial. Lapisan teratas, diduduki *Europeanen* yang terdiri dari orang Belanda dan ras Eropa lainnya. Lapisan kedua adalah *Vremde Oosterlingen* atau timur asing, termasuk di dalamnya orang Cina, India dan Arab. Sedangkan masyarakat lokal berada pada level terbawah yang disebut *inlanders*. Secara psikologis pembagian tersebut menghambat asimilasi. Orang Cina cenderung dekat dengan birokrasi dan kurang berasimilasi dengan masyarakat lokal. Sifat ini masih

¹⁰Emil Salim, "Membina Keselarasan Antara Pribumi-Nonpribumi", *Harian Merdeka*, tanggal 14-15 Desember 1983, dalam Junus Yahya (ed), *Nonpribumi di Mata Pribumi*, (Jakarta : Yayasan Tunas Bangsa), hlm.152-167.

terbawa-terbawa, walaupun setelah kemerdekaan masyarakat lokal yang beralih menjadi penguasa.

Pada masa ini struktur perdagangan didominasi oleh perusahaan-perusahaan asing dan para pedagang Cina. Kebijakan kolonial Belanda telah memberikan kepada orang Cina posisi yang penting dalam ekonomi menengah di dalam suatu piramida yang dinamakan struktur kasta kolonial yang berdasarkan pada sistem stratifikasi sosial yang pada pokoknya bersifat rasial. Kelompok pedagang Cina menguasai industri kecil dan menampung hasil para petani kecil dan menguasai sebagian besar lintas kegiatan pedagang kecil.¹¹

Ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, pengusaha Cina bertahan sebagai pedagang perantara. Berkuasanya orang-orang Cina dalam ekonomi Indonesia sangat tidak disenangi oleh para pengusaha lokal. Munculnya Syarikat Dagang Islam pada tahun 1912 adalah bertujuan mematahkan dominasi orang-orang Cina dalam bidang ekonomi.¹²

¹¹Yahya A.Muhaimin, *Bisnis dan Politik Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, (Jakarta : LP3ES,1991), hlm.2-3.

¹²Mely G.Tan, "Masalah Mayoritas-Minoritas di Indonesia", dalam *Prisma.8*. Agustus 1976, hlm.34.

Setelah kemerdekaan dan pengakuan kedaulatan, sistem dan struktur politik kolonial masih dominan sehingga pemerintah Indonesia berusaha untuk merestrukturalisasi perekonomian dari sisa-sisa ekonomi kolonial. Pandangan ahli ekonomi yang paling banyak dianut adalah nasionalisasi ekonomi, yaitu pemikiran-pemikiran ekonomi yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional. Aspek kegiatan perekonomian yang tidak lagi tergantung pada ekspor bahan mentah ke negeri. Dalam artian perekonomian berada pada masyarakat lokal. Maka muncullah kebijakan yang menghentikan kegiatan aktif perusahaan asing, tidak terkecuali terhadap investasi orang-orang Cina.¹³

Dalam realisasi kebijakan ekonomi nasional, pemerintah ketika itu meluncurkan Program Urgensi Ekonomi. Di mana Program Benteng yang terintegrasi di dalamnya menjadi salah satu bagian yang mengatur perdagangan orang-orang Cina. Program ini merupakan salah satu protektivitas kepada pedagang lokal. Namun program ini mengalami kegagalan dalam menciptakan *entrepreneurship* lokal yang tangguh. Kegagalan tersebut

¹³Yahya A.Muhaimin, *op.cit.*, hlm.21.

disebabkan kelemahan yang mendasar dari modal lokal, di mana mereka tidak memiliki sumber dana untuk memanfaatkan kredit dan perlindungan yang diberikan pemerintah.

Kondisi demikian memungkinkan kelompok Cina yang lebih siap menangani perekonomian setelah kemerdekaan, maka muncullah apa yang dikenal dengan pengusaha Ali-Baba. Pengusaha Ali-Baba adalah, pengusaha nonlokal Baba yang menjalankan bisnisnya dengan perlindungan nama besar pengusaha lokal atau menjalankan bisnisnya dengan lisensi yang dimiliki atas nama lokal Ali.

Semangat program Benteng meskipun tidak berhasil mencapai sasaran, namun menimbulkan perasaan yang bersifat permusuhan di kalangan kelompok nasionalis terhadap modal asing dan pengusaha Cina. Perasaan ini menjadi nyata ketika lahir Gerakan Asaat, berdasarkan pencetusnya Asaat, seorang nasionalis yang terkemuka.

Gerakan Asaat dimulai ketika Kongres Ekonomi Nasional Seluruh Indonesia pada tanggal 19 Maret 1956. Di dalam kongres tersebut, Asaat menginginkan ditarik garis lurus antara bangsa Indonesia dan keturunan Cina, dengan

perlindungan yang khusus harus diberikan kepada kelompok pertama. Tuntutan tersebut dianggap wajar, untuk mematahkan dominasi orang Cina dalam perekonomian Indonesia.¹⁴

Akibatnya kemudian lahir kebijakan berupa Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1959. Peraturan ini pada intinya menetapkan bahwa usaha kecil milik orang asing di tingkat desa tidak diizinkan lagi setelah tanggal 31 Desember 1959.

Dalam prakteknya orang asing yang terkena larangan itu hampir semuanya orang Cina. Oleh karena memang perdagangan eceran di tingkat pedesaan, terutama di Jawa hampir seluruhnya di tangan mereka.¹⁵

Sejak saat itu orang Cina hanya boleh berdagang di kota-kota kabupaten seperti yang ditetapkan dalam undang-undang ini, yang di dalam pelaksanaannya diserahkan kepada militer. Namun dalam penerapannya kurang berhasil karena kepentingan presiden Soekarno berseberangan dengan kaum nasionalis dan militer. Presiden Soekarno melihat perdagangan Cina ini dapat

¹⁴Mely G.Tan, *Prisma* 8, 1976, *op.cit.*, hlm.34

¹⁵*Ibid*, hlm.36.

mendukung politik internasionalnya dalam mempererat persahabatan dengan Republik Rakyat Cina.

Selain itu, di kalangan elite partai Majelis Syura Muslimin Indonesia dan Partai Sosialis Indonesia, birokrasi dan militer tidak mendukung borjuasi muslim dalam kedudukan mereka yang baru di dalam bidang ekonomi dan politik.¹⁶ Pada masa akhir Demokrasi Terpimpin merupakan masa kekacauan dan kemunduran di bidang ekonomi dan politik. Ketimpangan hidup antara yang kaum miskin dan kaya semakin melebar, hal ini merupakan suatu situasi yang sama sekali bertentangan dengan konsep sosialisme. Dalam kemerosotan harga produksi di berbagai sektor, inflasi semakin meningkat dan administrasi bertambah kacau yang memungkinkan tindakan korupsi sehingga perekonomian Indonesia seperti lepas kendali.

Ironisnya pemerintah mengembangkan retorika mengenai perjuangan menghancurkan imperialisme dan perjuangan nasional untuk menyelesaikan revolusi Indonesia.¹⁷ Keadaan ini mencapai klimaksnya pada peristiwa G 30 S PKI. Setelah melewati masa kritis itu,

¹⁶Yahya A.Muhaimin, *op.cit*, hlm.94.

¹⁷*Ibid*, hlm.48.

sejak akhir tahun 1965 sampai tahun 1967, kekuasaan presiden Soekarno berakhir.

Pada masa pemerintahan presiden Soeharto yang menamakan diri sebagai pemerintahan Orde Baru. Pergantian ini menjadi penting dalam kebijakan politik, ekonomi maupun sosiokultural di Indonesia. Untuk memperkokoh legitimasinya, pemerintah baru ini melakukan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama karena bidang ini mempunyai daya tarik bagi semua kalangan, baik pegawai negeri, kaum buruh, petani kecil, pedagang kecil dan militer.

Langkah pertama yang dilakukan Soeharto adalah merestrukturisasi perekonomian secara bertahap melalui Repelita I (1969/1970 sampai 1973/1974). Dalam restrukturisasi itu dilakukan program Penanaman Modal Asing pada tahun 1967 dan Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 1968. Pada intinya perekonomian Orde Baru membuka pintu bagi investasi asing secara besar-besaran. Dengan kebijakan tersebut modal asing menjadi katalisator pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang memberi rangsangan terhadap penanaman modal di dalam negeri.

Dalam menangani masalah Cina di bidang ekonomi, pemerintah Orde Baru menganggap masalah sudah selesai pada masa Orde Lama dan berusaha memanfaatkan modal dan kemampuan kewiraswastaan mereka demi kemajuan ekonomi Indonesia. Mengejar target ekonomi lebih utama bagi pemerintahan Orde Baru daripada mengurus masalah pertentangan antara lokal dengan nonlokal.¹⁸

Golongan minoritas Cina dimanfaatkan sebagai bagian integral pada masa Orde Baru dapat diartikan bahwa mereka memperoleh legitimasi tidak dianggap aneh dan bersifat alamiah.¹⁹ Pemerintah Orde Baru tidak lagi menggunakan istilah lokal dan nonlokal tetapi golongan ekonomi lemah dan golongan ekonomi kuat sehingga tidak ada lagi penggolongan yang berdasarkan rasialisme.

Ketika terjadi peristiwa Malapetaka Limabelas Januari 1974 di Jakarta sebenarnya yang didemo adalah penetrasi ekonomi Jepang yang semakin besar di Indonesia tetapi yang menjadi sasaran huru-hara adalah golongan Cina. Akibatnya pemerintah meninjau kembali kebijakan ekonomi dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No.14

¹⁸John,K.Neveront, *Jaringan Masyarakat Cina*, (Jakarta : Golden Terayon Press, 1994), hlm,59.

¹⁹Onghokham, *Prisma 4*, 1990, hlm.18.

Tahun 1979 dan dipertegas dengan Keputusan Presiden No.24A Tahun 1980 yang memberikan perlakuan istimewa dalam sektor ekonomi kepada golongan ekonomi lemah.

Kelompok yang dianggap dalam golongan ekonomi lemah yaitu; *pertama*, modalnya harus sekurang-kurangnya 50% adalah milik lokal. *Kedua*, lebih separuh dewan direksinya adalah orang lokal. *Ketiga*, modalnya haruslah kurang dari 25 juta dalam usaha perdagangan atau tidak lebih dari 100 juta dalam perusahaan kontruksi atau industri. Selain itu ditetapkan bahwa para direktur lokal haruslah aktif tidak boleh hanya sebagai simbol saja.²⁰

Kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut ternyata belum mampu menyelesaikan masalah kesenjangan ekonomi yang berkaitan dengan golongan Cina. Potensi dan peranan mereka dalam lintas perdagangan lebih menonjol dibandingkan dengan lokal seringkali dinilai sebagai sumber utama konflik. Hampir setiap lima tahun sekali di Indonesia terjadi huru-hara anti-Cina. Namun pada sisi lain, kelompok ini telah memberi warna sejarah

²⁰Charles A.Choppel, *op.cit*, hlm.60.

pada lintas perdagangan di kota Blangpidie Aceh Barat Daya sampai saat ini.

B. Permasalahan

Keberhasilan para pedagang Cina dalam mempertahankan eksistensinya di Aceh Barat Daya merupakan fenomena yang sangat menarik di tengah masyarakat mayoritas kabupaten yang dijuluki *Breuh Sigupai* ini. Namun di balik itu semua, kesenjangan kehidupan antara kelompok minoritas Cina yang kaya dengan mayoritas lokal yang tergolong miskin merupakan fenomena yang juga terlihat dalam masyarakat di kota ini. Ketidakseimbangan perekonomian yang mencolok ini mengakibatkan masing-masing kelompok hidup dalam lingkungan yang diskriminatif.

Kelompok minoritas Cina hidup dalam kelompok eksklusif di kota ini serta masih memupuk norma-norma leluhur mereka sehingga sering menimbulkan prasangka negatif dalam bidang kebudayaan, politik dan ekonomi sehingga mengakibatkan kondisi yang lebih buruk lagi yaitu antagonisme sosial di antara mereka. Pola hubungan interrasiyal yang seperti itu akan selalu diliputi oleh

suasana konflik sosial terpendam atau *latent social conflict* yang sewaktu-waktu dapat meledak bila ada pemicunya.

Kelompok pedagang Cina di Aceh Barat Daya khususnya kota Blangpidie tetap berada pada posisi berbahaya betapapun kuat perlindungan hukum dan keamanan terhadap mereka. Kedudukan kaum minoritas tersebut sempat terusik dengan kerusuhan sosial. Kerusuhan sosial ini terjadi secara anarkis seperti pengrusakan terhadap toko-toko dan perampasan barang-barang dagangan milik Cina yang menimbulkan kerugian yang sangat besar dan juga membuat suasana kota mencekam selama sehari penuh. Peristiwa kerusuhan sosial anti-Cina di Aceh Barat Daya terjadi pada tahun 1982.

Konflik rasial itu ditenggarai terjadi sebagai akibat kesenjangan perekonomian antara masyarakat lokal dengan kelompok pedagang Cina. Namun akhirnya kerusuhan sosial ini dapat diredam, setelah adanya tindakan tegas dari pemerintah melalui tindakan aparaturnya militer dan kepolisian.

Keberadaan pedagang Cina di Aceh Barat Daya, jika ditelusuri jejaknya berawal dari produk sejarah kolonial Belanda. Dalam perjalanan historis mereka dapat

mengembangkan sayap perdagangannya dengan baik di kota ini. Perkembangan perdagangan Cina telah memberikan *trickle down effect* dan *multiplier effect* bagi perkembangan perdagangan lokal pada saat ini terutama dalam penerapan sistem perdagangan ala mereka. Namun masih pada taraf perdagangan tertentu seperti kelontong, sedangkan dalam perdagangan yang membutuhkan keahlian khusus seperti perhiasan emas, elektronik dan elektrik serta onderdil mobil dan motor pedagang Cina masih belum terkalahkan.

Mereka menguasai perdagangan Aceh Barat Daya, khususnya di pusat kota, seperti di jalan Perdagangan, jalan Persada, jalan Sentral dan jalan Pasar Lama. Selain berdagang, mereka juga mengusahakan sarang burung walet. Sedangkan pedagang lokal dari etnik lainnya mayoritas berkonsentrasi di sekitar jalan Selamat, jalan At Taqwa, jalan Haji Ilyas dan Pasar Baru Blangpidie.

Dalam mengarahkan penelitian diajukan beberapa pertanyaan yang relevan dengan permasalahan, yaitu ;

1. Mengapa terbentuk komunitas Cina di Aceh Barat Daya?

2. Bagaimana dinamika perkembangan pedagang Cina dalam lintas perdagangan di Aceh Barat Daya dari waktu ke waktu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah; *Pertama*, untuk mendokumentasikan peristiwa sejarah lokal khususnya terbentuknya perdagangan Cina di Aceh Barat Daya. *Kedua*, untuk mengetahui dinamika perkembangan pedagang Cina dalam lintas perdagangan di Aceh Barat Daya dari waktu ke waktu.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai input bagi Pemerintah Daerah setempat khususnya dalam membuat kebijakan lokal yang melindungi dan melestarikan perdagangan serta menghormati perbedaan kebudayaan minoritas Cina di kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh.

D. Ruang Lingkup Kajian

Pedagang Cina dalam lintas sejarah perdagangan sudah dikenal sejak dahulu di Aceh Barat Daya. Keberadaan mereka pada awalnya merupakan produk sejarah kolonial sejak Belanda eksis dalam mengokohkan

hegemoninya di sana dengan menempatkan satu SSK pasukan Marsose di tangsi Kuta Batee.

Dalam perjalanan historis kelompok Cina yang pertama digunakan sebagai tenaga kerja pada pembangunan sarana dan prasarana yang dibangun Belanda di sana. Lambat-laun mereka muncul menjadi pedagang perantara bagi kolonial dan lokal. Mereka ternyata sangat luwes dalam mengikuti dinamika sosial, perekonomian dan perubahan politik baik skala nasional maupun tingkat lokal sehingga mampu menyesuaikan diri. Untuk mengkaji lebih mendalam tentang permasalahan dimaksud, diperlukan fakta-fakta dan proses perkembangan daripadanya.²¹

Penelitian ini mengambil batasan spasial Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh. Sedangkan batasan temporal adalah tahun 1900-2008.

Tahun 1900 merupakan awal keberadaan orang-orang Cina di Aceh Barat Daya. Sedangkan tahun 2008 merupakan akhir pengkajian dimaksud.

²¹ W.D.Sukisman, *Masalah Cina di Indonesia*, (Yayasan Penelitian Masalah Asia, 1975), hlm.1.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penulisan sejarah lokal yang mengambil aspek perdagangan Cina sebagai kajiannya maka dalam pembahasannya menekankan aspek prosesus sedangkan aspek struktural dilakukan sebagai usaha untuk memahami aspek yang dikaji secara lebih mendalam.²²

Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis dalam merekonstruksi kembali peristiwa yang terjadi. Langkah selanjutnya adalah penulisan dengan deskriptif analitis sehingga diharapkan hasilnya berupa eksplanasi sejarah yang mendekati bentuk kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Namun mengingat kompleksitas permasalahan yang ada dan begitu penting semua untuk dibahas maka diperlukan suatu pendekatan yang melingkupi kompleksitas peristiwa itu sehingga ada keterkaitan antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya dalam waktu dan tempat yang berbeda serta tidak berdiri sendiri-sendiri.

Penelitian ini dilakukan melalui empat tahap; *Pertama*, pengumpulan data atau obyek bahan-bahan

²²Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1980), hlm. 24.

tertulis dan lisan yang relevan. *Kedua*, menyeleksi dan menyingkirkan bahan-bahan yang tidak otentik. *Ketiga*, menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya mengenai bagian yang otentik (kritik intern). *Keempat*, penyusunan kesaksian yang dapat dipercaya menjadi suatu kisah atau penyajian yang berarti.²³

Pengungkapan kompleksitas peristiwa dapat dilakukan dengan pendekatan interdisipliner atau pendekatan dalam konteks dan konsep ilmu sosial. Hal ini dimaksudkan agar rekonstruksi yang dihasilkan lebih bersifat integral dan dinamis sehingga segala aspek dan fenomena historis dapat tertuang dalam suatu deskripsi dengan gambaran yang dihasilkan lebih bernuansa, tidak datar dan komprehensif.

Penelitian ini menekankan pada studi literatur untuk mengkaji setiap permasalahan dengan sumber-sumber primer seperti arsip-arsip, dokumen-dokumen, surat kabar sezaman. Selain itu, dibutuhkan informan yang terlibat secara langsung dalam peristiwa, namun dikarenakan banyak di antara mereka yang sudah

²³Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto, (Jakarta : Yayasan Penerbitan Universitas Indonesia), 1975 hlm. 18.

meninggal ataupun sudah tidak berada di Aceh Barat Daya. Kesulitan lainnya adalah mencari keterangan dari orang Cina secara lebih mendalam sangat sulit, karena keterbatasan waktu yang disebabkan aktivitas yang sibuk.

Adapun jenis data dan referensi yang dipakai dalam penelitian ini ditekankan pada data-data sekunder, selain itu juga menggunakan data-data primer. Maka prioritas utama adalah studi kepustakaan. Sedangkan untuk memenuhi data primer, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dari golongan Cina maupun tokoh masyarakat lokal yang dianggap relevan serta kredibel sebagai informan.

Penelitian ini menelusuri data-data dari beberapa perpustakaan yang ada di Aceh seperti perpustakaan Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Aceh, Perpustakaan Universitas Syiah Kuala, Perpustakaan PIISB Universitas Syiah Kuala, Perpustakaan IAIN Jamiah Ar Raniry, Perpustakaan Ali Hasymi dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibagi dalam lima bab. Bab pertama Pendahuluan, terdiri dari latar belakang permasalahan,

pembatasan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua profil daerah dan sejarah kenegerian Aceh Barat Daya, berisi deskripsi wilayah, sejarah kenegerian dan penyebaran Cina.

Bab ketiga kondisi sosial budaya Aceh Barat Daya, berisi terdiri dari keadaan etnis Cina dan keadaan etnis lainnya serta hubungan antara etnis Cina dan etnis lainnya.

Bab keempat Cina dalam lintas perdagangan di Aceh Barat Daya, berisi perdagangan era maritim, perdagangan era daratan dan perdagangan kontemporer.

Bab kelima adalah penutup, berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

PROFIL DAERAH DAN SEJARAH ACEH BARAT DAYA

A. Deskripsi Wilayah

Aceh Barat Daya secara astronomi terletak di antara 3°,05–3,80 lintang utara dan 96°,23.02–97°,23,03 bujur timur.¹ Sedangkan letak geologinya tidak terlepas dari rangkaian pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari provinsi Aceh sampai ke provinsi Lampung. Daerah ini termasuk dalam rangkaian pegunungan yang masih muda yang diketahui dengan adanya gejala-gejala geologis seperti gempa bumi dan aktivitas gunung berapi yang dikenal dengan patahan semangka.²

Secara geografis daerah ini diapit pegunungan Bukit Barisan di sebelah timur dan Samudera Indonesia di sebelah baratnya. Sedangkan di sebelah utara diapit oleh Kabupaten Nagan Raya dan di selatannya diapit Kabupaten

¹Zakaria Ahmad, *Negeri dan Rakyat Aceh Barat Daya Dalam Lintasan Sejarah Menuju Daerah Otonom*, (Blangpidie: Pemda, ABDYA), 2007, hlm.83. Lihat juga BPS, *Aceh Barat Daya Dalam Angka*, Tahun 2005, kerjasama BPS dan Bappeda Aceh Barat Daya. hlm.3.

²*Ibid.* hlm.83

Aceh Selatan.³ Daerah ini berada di tenggara provinsi Aceh namun karena Kabupaten Aceh Tenggara sudah terlebih dulu lahir, maka para pelopor perjuangan lahirnya kabupaten bersepakat menamakan Aceh Barat Daya⁴, di mana pada saat itu sedang terintegrasi di dalam lingkup geografis Aceh Selatan.

Daerah ini beriklim tropis dengan curah hujan dan kelembaban yang tinggi. Temperatur udara berkisar antara 26°-30° Celcius. Di dataran tinggi dan pegunungan berkisar antara 15°-23° Celcius tetapi kadangkala dapat mencapai 12° Celcius.⁵

Curah hujan berkisar antara 3.228 mm - 4.912 mm per tahun. Kelembaban udara tercatat antara 70-80% dan hanya pada bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus udara relatif kering.⁶

Topografi daerah ini berbukit-bukit dengan dataran yang relatif sempit dibandingkan dengan pesisir timur Aceh. Bukit Barisan yang sebagian besar pesisir barat berlereng agak curam dan bergunung-gunung kecuali sedikit yang agak luas di ambang dataran rendah

³*Ibid.*

⁴*Ibid*, hlm. 85

⁵*Ibid.*

⁶ *Ibid.*

(*embayment*) Meulaboh dan Singkil yang memiliki kelebaran 10 kilometer ke arah pegunungan Bukit Barisan.

Ambang dataran rendah di daerah ini terletak di bagian barat di beberapa tempat terdapat rawa-rawa, yaitu di Kecamatan Kuala Batee dan Babahrot. Daerah pegunungan terletak di sisi sebelah timur dengan Gunung Leuser yang terletak di sebelah barat wilayah ini.

Daerah ini berada pada ketinggian 0-100 meter dari permukaan laut yang merupakan seluas 43,04% luas keseluruhan daerahnya. Selebihnya adalah daerah landai dengan kemiringan seluas 27,05%,. Sedangkan daerah yang bergelombang seluas 21, 81% dan daerah yang terjal seluas 5,10%.⁷

B. Sejarah Kenegerian Aceh Barat Daya

Asal-usul masyarakat yang mendiami pantai barat daya Aceh mulai dari Ujong Manggeng hingga Ujong Raja, berdasarkan sumber lisan dan juga sumber tertulis yang sangat terbatas. Menurut tradisi lisan, penduduk yang pertama mendiami daerah ini adalah orang Batak dari daerah Karo yang dalam istilah lokal sering disebut Batak

⁷*Ibid.*

Duaploah Tujoh. Hal ini juga dikaitkan dengan keberadaan toponimi suatu daerah yaitu Guha Batak yang terdapat di pedalaman Kuta Batee atau Blangpidie sekarang ini.

Koloni orang Batak dikalahkan oleh para pendatang baru yang berasal dari Sumatera Barat maupun dari daerah lain di Aceh sendiri. Mereka kemudian menyingkir ke pedalaman di Bebesan Kabupaten Gayo Lues sekarang.⁸ Di sana sampai sekarang dikenal dengan Belah Bebesan yang secara silsilah bernenek moyang dari Batak.

Suku Minangkabau bermigrasi ke daerah itu diperkirakan pada bagian kedua abad ke-17, karena semenjak Belanda menduduki Sumatera Barat setelah *Traktat Painan* tahun 1663. Kerajaan Aceh Darussalam yang sebelumnya mengontrol daerah tersebut tentu saja menerima kedatangan orang Minangkabau yang tidak mau tunduk di bawah kekuasaan Belanda bermigrasi ke pantai barat Aceh. Sebagian di antara mereka membangun koloni di Susoh dan sebagian lainnya di Meulaboh atau di tempat

⁸*Ibid.*

lain.⁹ Mereka disebut sebagai Aneuk Jamee atau orang tamu yang harus dihormati dan dimuliakan.

Hampir bersamaan dalam periodisasi itu daerah Aceh Barat Daya didatangi pula orang-orang Aceh yang berasal dari Aceh Besar dan Pidie dengan maksud membuka perkebunan (*seuneubok*) lada yang hingga awal abad ke-19 merupakan tanaman ekspor terpenting di Aceh.¹⁰ Koloni Minangkabau dan Aceh membangun komunitas mereka terutama di muara-muara sungai setempat, seperti Lama Tuha, Kuala Batu, Susoh, Suak, Lhok Pawoh Utara, dan Pasi Manggeng. Lambat-laun pemukiman itu berubah menjadi suatu pemerintahan lokal yang berdiri sendiri tetapi berada di bawah perlindungan Kerajaan Aceh Darussalam.

Namun ada juga di antara mereka yang berhasil melakukan konsolidasi kekuasaan berkat kegiatan perniagaan lada sebagaimana yang terjadi dilakukan Leube

⁹Tentang penetrasi Belanda di Sumatera Barat dan konflik dengan penguasa Aceh di sana dapat dilihat dalam M. Said, *Aceh Sepanjang Abad*, (Medan : Percetakan Waspada, 1961), hlm. 384-400.

¹⁰Tentang kedatangan atau perpindahan penduduk orang Aceh ke pantai barat, sehingga pernah menimbulkan peperangan dengan permukiman asal Sumatera Barat di pantai barat pada awal abad ke-18, lihat *Hikajat Potjut Muhammad*, edisi GWJ Drewes, Martinus Nijhoff, *the Hague*, 1979, hlm. 116.

Dafa di Susoh dan Datuk Beusa di Manggeng pada permulaan abad ke-19. Datuk Beusa enggan membayar upeti kepada Sultan Aceh sehingga Sultan Alauddin Jauhar al-Alamsyah (1795-1824) cukup murka dan memutuskan berlayar sendiri untuk menyerang Datuk Beusa di negeri Manggeng.¹¹

Dengan adanya inspeksi dan kontrol hegemoni yang dilakukan oleh Sultan Aceh bukan berarti bahwa kerajaan-kerajaan kecil itu secara mutlak dapat diperintah dengan baik di pusat kerajaan Bandar Aceh Darussalam. Kadangkala mereka sendiri berhubungan dengan orang-orang luar di dalam perdagangan lada dan lain sebagainya tanpa mau membayar *pajak nanggroe* atau upeti ke pusat kerajaan.

Daerah ini misi perdagangan Inggris, Amerika dan Belanda dapat secara leluasa memasuki dan melakukan hubungan perdagangan dengan pelabuhan-pelabuhan di pantai Barat Daya pada permulaan abad ke-19. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh John Anderson

¹¹Lihat R. Hoesein Djajadiningrat "Critisch Overzicht van de in Maleische werken vervette Gegevens over de Geschiedenis van het Soetanaat van Atjeh", *BKI*, 1911, hlm. 263.

yang menyinggahi pelabuhan Manggeng, Susoh, Kuala Batu dan Seumayam.¹²

Pada tanggal 3 Februari 1831, di Kuala Batu terjadi konflik antara anak buah kapal dagang Amerika Serikat Friendship dengan penduduk Kuala Batu sehingga terjadi insiden bersenjata.¹³ Akibat dari kejadian tersebut pelabuhan ini kemudian diserang hingga hancur oleh armada angkatan laut Amerika Serikat dengan kapal perang Potomac pada tanggal 6 Februari 1832.

Sedangkan tetangganya pelabuhan Susoh merupakan teluk yang tenang. Pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19, Susoh menjadi salah pusat perdagangan di pantai barat Aceh dengan sentralnya di Kedai Susoh. Penduduk-penduduk yang ada di sekitar Kedai Susoh kemudian menyebar ke berbagai daerah di pantai barat tersebut seperti yang dilakukan oleh Leube Dafa dan Raja Bujang yang sudah sejak lama menetap di Susoh, bermigrasi ke Trumon dan Singkil.¹⁴

¹²John Anderson, *Acheen and the Port on the North and East Coast of Sumatra*, hlm. 159.

¹³A. Doup, "Beknopt Overzicht van de Krijgsgeschiedenis van Tapa' Toean en de Zuidelijke Atjehsche Landschappen", *Korps Marechaussee Atjeh*, April, 2, 1890-1940.

¹⁴John Anderson, *op. cit.*, hlm. 117.

Hal demikian juga disebutkan oleh Kapten Canning yang pernah meninjau Aceh atas perintah Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Kalkuta India menyebutkan bahwa Leube Dafa yang menguasai pelabuhan di pantai barat maupun selatan Aceh seperti Singkil, Ayam Dammah, Trumon, Rambong, Seuleukat, Susoh dan Kuala Batu.¹⁵ Setelah pindah ke Trumon dengan kekayaannya ia mampu mendirikan kerajaan di Trumon. Selanjutnya dia mengawini puteri Raja Singkil sehingga menjadi kaya raya, bahkan kemudian diangkat menjadi raja di daerah itu.¹⁶

Susoh menjadi pusat perdagangan ditopang oleh beberapa negeri di sekitarnya, seperti Kuala Batu, Kuta Batee, Lhok Pawoh Utara dan Manggeng, serta Gayo Lues (Patiambang). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Susoh pada waktu itu merupakan mata rantai perdagangan di pantai barat daya Aceh bahkan kenegerian yang ada di pantai barat daya itu secara politik dahulunya termasuk wilayah Susoh.

Menjelang penaklukan kerajaan Aceh oleh Belanda, di pantai barat daya telah berdiri sejumlah kenegerian yang berdiri sendiri di bawah payung Kerajaan Aceh

¹⁵*Ibid.*, hlm. 51.

¹⁶*Ibid.*

Darussalam. Menurut van Langen (1888), seorang asisten residen Aceh Barat pada tahun 1881-1886, Susoh terletak di sebuah teluk, sebelah timur berbatasan dengan Kuta Batee dan sebelah barat dengan Lautan Hindia.

Orang Aneuk Jamee atau Minangkabau yang dipimpin oleh Datuk Bagak bermigrasi ke Susoh. Setelah adanya persetujuan penguasa Batak yang berkuasa di tempat itu, ia menikah dengan salah seorang putri Raja Batak sehingga kemudian mengislamkan sebagian dari mereka. Berkat bantuan orang Minangkabau di Seunagan yang dipimpin oleh Datuk Baginda, maka Datuk Bagak memerangi dan mengusir mereka yang tidak mau menganut agama Islam dari daerah tersebut.

Datuk Bagak dan Datuk Baginda kemudian membagi wilayah itu dan memerintah secara bersama-sama.¹⁷ Mereka berasal dari suku Barat, Pariaman, Sumatera Barat. Datuk Bagak menguasai daerah kiri Sungai Pinang dengan nama Kampung Barat. Datuk Baginda bergelar Datuk Raja menguasai daerah sebelah

¹⁷ K.F.H. Van Langen, *Atjeh's Westkust Met Daarbij Behoorende Kaart*, (Leiden : E. J. Brill, 1888), hlm. 215-216.

kanan Sungai Pinang yang dikenal dengan nama Kampung Pinang.¹⁸

Gelombang migrasi Aneuk Jamee selanjutnya diizinkan oleh Datuk Bagak membuat permukiman di daerahnya untuk bertani lada. Mereka berasal dari suku Kabung dari Kampar Riau yang dipimpin oleh Datuk Marah Padang yang mendirikan Kampung Durian Rampak.¹⁹

Setelah itu datang lagi migrasi suku Rawo dari Pariaman dipimpin oleh Datuk Mageh Kesumba. Mereka meminta izin kepada Datuk Bagak untuk bertani di pedalaman Susoh. Mereka dikenal sebagai pendiri Kampung Rawa.²⁰ Selanjutnya datang kelompok Datuk Baginda yang mempunyai relasitas keluarga dengan kelompok Aneuk Jamee di Seunagan yang di pimpin Datuk Binca. Mereka membangun koloni di daerah Susoh dengan mendirikan Kampung Pawoh.

Pada waktu itu, orang-orang Aneuk Jamee yang berada dalam lingkungan wilayah yang dikuasai oleh orang-orang Aceh dengan kebebasan terbatas. Namun mereka masih mempertahankan kultur dan hubungan

¹⁸J. Kreemer, *Atjeh: Algemeen Samenvatted Overzicht Land en Volk van Atjeh en Onderhoorigheden*, (Leiden : E.J. Brill, 1923), hlm. 232.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ K.F.H. Van Langen, *op. cit.*, hlm. 216.

kekeluargaan sehingga tetap berlaku seperti di negeri asalnya.²¹

Pemerintahan Susoh pada waktu itu dijabat oleh dua orang datuk. Datuk Bagak dari Kampung Barat yang bergelar Datuk Tuwo berkedudukan di Susoh sedangkan yang kedua dijabat oleh Datuk Baginda dari Kampung Pinang. Selain itu, datuk-datuk dari Kampung Durian Rampak dan Kampung Rawo berada di bawah Datuk Tuwo, sedangkan Datuk Kampung Pawoh berada di bawah Datuk Baginda.²²

Silsilah datuk-datuk yang memerintah di kenegerian Susoh hingga tahun 1888 adalah sebagai berikut; keturunan Datuk Bagak memerintah selama hampir setengah abad, yaitu Datuk Buluh, Datuk Menggalam dan Datuk Muhammad Yatim. Mereka menjadi pemimpin Datuk Negeri Susoh dengan gelar Datuk Tuha. Keturunan Datuk Baginda adalah Datuk Baginda Raja, Datuk Poh, Datuk Keng, Datuk Medan dan Datuk Nyak Din. Mereka menjadi pemimpin Susoh dengan gelar Datuk Baginda. Keturunan dari Datuk Kabung adalah Datuk

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

Merah Padang, Datuk Makah, Datuk Falib dan Datuk Derham. Mereka menjadi Datuk Kampung Durian Rampak dengan gelar Datuk Baru. Keturunan Datuk Rawa, yaitu Datuk Mageh Rawa, Datuk Baren, Datuk Yamaha, Datuk Marah Alam. Mereka menjadi pemimpin Kampung Rawa. Keturunan Datuk Pawoh, yaitu Datuk Binca, Datuk Ampek Suku, Datuk Kedusun, Datuk Kecil Lintang, Datuk Kesiring, dan Datuk Asim. Mereka menjadi pemimpin Kampung Pawoh, dengan gelar Datuk Ampek Suku.²³

Pada masa pemerintahan Sultan Ibrahim yang bergelar Alaidin Mansursyah 1836-1870²⁴, dikirim sebuah ekspedisi penertiban ke Susoh yang dipimpin oleh pangeran Tuanku Husen, karena negeri ini tidak membayar pajak yang telah ditentukan. Dalam penyerangan itu, pasukan kerajaan Aceh dibantu oleh Datuk Keng dari keturunan Datuk Baginda. Sementara itu, Susoh dipimpin oleh Datuk Kepala keturunan Datuk Tuwo. Peperangan berakhir setelah negeri ini kembali menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Kerajaan Aceh.

²³*ibid.*, hlm. 217-218.

²⁴Sultan Ibrahim dua kali memerintah di Kerajaan Aceh, pertama hingga tahun 1836 dan periode kedua hingga tahun 1870.

Antara penduduk Susoh dengan kenegerian sekitarnya terdapat hubungan kekeluargaan, walaupun sudah berjauhan silsilahnya. Matapencaharian mereka adalah pertanian sawah, perikanan dan perdagangan. Produksi perikanan mayoritas dipasarkan ke berbagai pelabuhan di Aceh hingga ke dataran tinggi Gayo.

Sedangkan Kuala Batu merupakan daerah penyangga Susoh yang dipimpin oleh Keucik Karim. Beliau meminta izin kepada Datuk Susoh untuk membuka perkebunan lada di Lama Inong pedalaman Kuala Batu. Permintaan izin disetujui dengan syarat membayar pajak kepada Datuk Susoh dan Sultan Aceh.²⁵

Selanjutnya Leube Dafa sebagai pemerintah Kerajaan Aceh Darussalam di negeri Trumon yang merupakan wakil Sultan Aceh dalam mengutip pajak di daerah pesisir barat. Keucik Karim yang bergelar Teuku Lama di pelabuhan Kuala Batu membayar seluruh pajak yang menjadi kewajibannya namun lambat-laun dalam produksi lada selanjutnya sudah tidak mau mengirimkan upeti kepada Sultan. Demikian juga kapal-kapal yang seharusnya memuat lada melalui pelabuhan Susoh mulai

²⁵ K.F.H. Van Langen, *op. cit.*, hlm. 210.

dialihkan ke Kuala Batu sehingga kenegerian Susoh mengalami kerugian.²⁶

Dalam bisnis pelayaran dan perdagangan, Leube Dafa mendapat laba yang signifikan dari komisi dan biaya angkutan kapal. Ia kemudian berunding dengan Datuk Susoh untuk menjadikan Kuala Batu sebagai pelabuhan resmi. Tugas itu diserahkan kepada anaknya Teuku Nyak Aji dan Raja Bujang. Namun terlebih dulu beliau meninggal sehingga realisasi perjanjian itu menjadi terhambat.²⁷

Kuala Batu akhirnya diserang oleh Datuk Susoh dibantu oleh Raja Trumon. Dalam peperangan itu kemenangan silih berganti dan konflik tersebut berakhir setelah berlangsungnya perkawinan antara putera Teuku Lama yang bernama Raja Kuala dengan cucu Datuk Bagak dari Susoh.²⁸

Setelah Teuku Lama meninggal kekuasaan dipegang oleh saudaranya Raja Pidie. Raja Pidie sendiri semenjak remaja berpengalaman dalam manajemen pemerintahan. Ia sedari mudah sudah terlibat dalam upaya perdamaian antara Kuala Batu, Susoh dan Trumon.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, hlm. 210-211.

Setelah merasa berkemampuan untuk berkuasa, ia menghadap Sultan di Bandar Aceh untuk memandirikan Kuala Batu dari Susoh.

Raja Pidie menikahi seorang perempuan dari etnis Aneuk Jamee yang berasal dari Air Bangis, Sumatera Barat. Dari perkawinan ini mendapat seorang anak laki-laki yang bernama Raja Sulaiman. Pada saat Raja Sulaiman dewasa, ia memerintah di sebelah kiri Krueng Batu. Sedangkan sebelah kanannya dikuasai oleh Pocut Hasan, anak dari Pocut Abdullah, seorang pemimpin komunitas dari daerah XXVI Mukim Aceh Besar. Pada awalnya mereka datang bersama-sama dengan Pocut Kuala ketika masa pemerintahan Raja Pidie.

Ia tetap memerintah kerajaan negeri Kuala Batu hingga tahun 1881. Raja Sulaiman memerintah di Madat Manyang, Sarulah, Sikabu, Teurubue, Lama Inong dan Siangen-Angen. Sedangkan Pocut Hasan wilayah kekuasaannya meliputi Lhok Ek, Kuta Raya dan Kuta Cot Dolah. Sedangkan daerah-daerah yang tunduk kepada raja Kuala Batu adalah negeri Seumayam, Surin, Lama Tuha, dan Lama Muda.²⁹

²⁹ *Ibid.*, hlm. 211.

Penduduk Kuala Batu mengusahakan perkebunan lada, menanam padi dan mengumpulkan hasil hutan serta perdagangan maritim yang berpusat di pelabuhan Kuala Batu. Pelabuhan ini pernah menjadi pusat perdagangan internasional. Namun setelah diserang oleh armada angkatan laut Amerika Serikat dengan kapal *Potomac* pada tahun 1832. Hal itu berkaitan dengan peristiwa sebelumnya akibat penyanderaan kapal dagang Amerika Serikat yang bernama *Friendship* yang sedang membeli lada masyarakat dari sekitar pelabuhan Kuala Batu.

Akhirnya Kuala Batu menandatangani *korteverklaring* pada tahun 1881 sebagai tanda tunduk kepada pemerintah kerajaan Belanda.³⁰ Perjanjian itu ditandatangani oleh Raja Sulaiman.

Selanjutnya kenegerian Pulo Kayu dibangun oleh Datuk Ampek dari Kenegerian Susoh, namun datang orang Aceh yang berasal dari XXVI Mukim, Aceh Besar dan meminta izin kepada Datuk Susoh untuk bermukim dan membuka perkebunan lada. Permohonan dikabulkan dengan syarat harus membayar pajak untuk negeri Susoh dan Sultan Aceh. Kewajiban terhadap pajak tersebut

³⁰ A. Doup, *op. cit.*, hlm. 9.

ternyata tidak dipenuhi terus-menerus sebagai persyaratan yang telah disepakati. Mereka hanya membayar pajak kepada Datuk Susoh selama dua kali panen saja.³¹

Ketika Pulo Kayu dipimpin oleh Datuk Mak Ubat, Teuku Lambada Adam diangkat sebagai syahbandar. Untuk membebaskan diri dari negeri Susoh, dibuatlah sebuah saluran baru sepanjang 600 meter yang terletak dekat Pulo Kayu menuju arah laut sebagai pengganti muara sungai. Kanal tersebut dipakai sebagai jalan untuk mengeluarkan lada dari hulu ke laut yang sebelumnya melalui sungai Pinang dekat negeri Susoh. Saluran itu diberi nama dengan Air Bekali.³²

Pada masa pemerintahan Sultan Ibrahim dengan gelar Alaidin Mansursyah (1836-1870), beliau mengirim seorang utusan untuk memungut pembagian upeti lada di Pulo Kayu kepada Datuk Susoh. Beliau kemudian memandatkan kepada Teuku Lambada Adam yang menjadi syahbandar Pulo Kayu. Tuntutan itu ditolak dan kapal utusan Kerajaan Aceh Darussalam yang berlabuh di Pulo Kayu ditenggelamkan dengan tembakan meriam.

³¹ K.F.H. van Langen, *op. cit.*, hlm. 212.

³² *Ibid.*

Setelah itu, Teuku Nyak Syeh seorang pemimpin petani lada dari Pidie meminta izin kepada Datuk Susoh untuk mengeluarkan lada melalui pelabuhan Pulo Kayu. Permohonan itu disetujui dengan syarat harus membayar upeti yang telah ditetapkan.

Urutan *uleebalang* yang memerintah di Pulo Kayu adalah Teuku Nyak Syeh, Teuku Nyak Husin, Teuku Nyak Sawang dan Teuku Raja Cut. Ketika Teuku Raja Cut masih kecil, ibunya menikah dengan Raja Kuta Batee, Teuku Ben Mahmud.³³ Pada tahun 1880, Pulo Kayu menandatangani perjanjian *korteverklaring* atas nama Teuku Raja Sawang, karena saat itu Teuku Ben Mahmud masih kecil.

Kuta Batee awalnya termasuk wilayah Susoh. Pada mulanya orang yang mendiami daerah itu adalah Batak Duaploh Tujoh dan Gayo di bagian utara. Namun mereka kemudian terdesak oleh para imigran yang datang yaitu orang Aneuk Jamee (Minangkabau). Kemudian datang orang dari Aceh Besar di bawah pimpinan Teungku Di Lhong. Sedangkan orang dari Pidie dipimpin oleh Teuku Lampoh Deu yang mendiami pedalaman Susoh di dataran

³³ *Ibid.*, hlm.212-213.

rumpun yang terletak di daerah Kuta Batee. Mereka membuka lahan persawahan.

Setelah itu datang kelompok Teuku Ben Agam, juga dari Pidie mendiami daerah Pulo Dua. Selanjutnya pada sekitar abad ke-19, datang pula Teuku Keucik Bo Kuta dan mendiami daerah Kutatinggi. Sementara Panglima Langsa mendiami daerah Lampohdrien, sedangkan Pang Ujoh mendiami daerah Kutatuha.

Pada mulanya setiap pendatang itu membentuk koloni permukiman yang terlepas satu sama lain dan saling curiga-mencurigai, sehingga sering terjadi peperangan antarkelompok di sana. Peperangan terus berlanjut dan baru berakhir setelah Tuanku Husin bin Sultan Ibrahim yang bergelar Alaidin Mansursyah (1836-1870), dapat mendamaikan keduabelah pihak yang bertikai dan sekaligus mengakui Kuta Batee di bawah kekuasaan Teuku Ben Agam terlepas dari Susoh. Setelah Teuku Ben Agam meninggal dunia, digantikan oleh anaknya Teuku Ben Abbas dan seterusnya digantikan otomatis oleh anaknya Teuku Ben Mahmud.³⁴

³⁴ *Ibid.*, hlm. 214.

Pada masa kecil Teuku Ben Mahmud, yang bertindak sebagai pemangku raja dan pengendalian pemerintahan Teuku Raja Sawang, *uleebalang* Pulo Kayu. Teuku Raja Sawang yang bertindak atas nama *uleebalang* Kuta Batee menandatangani surat perjanjian kerjasama *korteverklaring* dengan Belanda pada tahun 1884.

Pada tahun 1908 Teuku Ben Mahmud dikembalikan haknya sebagai *uleebalang* Kuta Batee, setelah berdamai dengan Belanda. Hubungan antara *uleebalang* Kuta Batee dengan *uleebalang* Pulo Kayu bermula dari pendiri Pulo Kayu yang bernama Teuku Nyak Syech yang menikahi Nyak Buleun, cucu tertua dari Teuku Ben Agam, *uleebalang* kenegerian Kuta Batee yang pertama.

Teuku Ben Mahmud memerintah atas penunjukan Sultan Aceh dengan gelar Teuku Ben Mahmud Setia Raja, sekitar tahun 1885. Sedangkan berdasarkan *besluit* Belanda untuk Kuta Batee dijabat oleh Teuku Raja Sawang berdasarkan *korteverklaring* Pulo Kayu tahun 1884.³⁵

³⁵*Ibid*, hlm. 64. Teuku Raja Sawang berasal dari Ie Leube, Pidie. Namun berdasarkan sebuah sumber dari catatan Belanda, *Mededeelingen van de Afdeeling Bestuurszaken der Buitengewesten het Departement van BB Serie A3*, menyebutkan bahwa Blangpidie dan Susoh menandatangani *Korte Verklaring* pada tahun 1874.

Permintaan kepada Belanda bahwa negeri Kuta Batee dan Pulo Kayu, masing-masing merupakan negeri mandiri. Penguatan perjanjian itu dituangkan dalam Akta No.10 tanggal 15 Juni 1901, ketika Teuku Raja Cut memerintah. Akan tetapi Akta persetujuan tersebut tidak sempat dilaksanakan karena kematian Teuku Raja Cut, sehingga lama-kelamaan keturunan Teuku Ben (Teuku Ben Agam, Teuku Ben Abbas dan Teuku Ben Mahmud) dianggap sebagai penguasa di dua daerah tersebut.

Pada tahun 1910, Kuta Batee terdiri dari empat *uleebalang cut*, yaitu Pulo Kayu yang dipimpin oleh Teuku Umar, mertua Teuku Raja Cut. Wilayahnya terdiri dari Keude Pulo Kayu, Alue Sungai Pinang, Guhang, Ladang Neubok, Padang Glumpang, Iku Lhueng, Paya Pisang Klat, Lhueng Tarok, Lhueng Asan, Gunong Cut, serta Alue Rambot.

Selanjutnya Kuta Tuha, dipimpin oleh Teuku Ben Mahmud Blangpidie, yang meliputi wilayah yaitu, Kuta Batee dan Pante Ara, yang kemudian berkembang menjadi Keude Sibbleh. Lampoh Drien, dipimpin oleh Teuku Dirih, meliputi Seunaloh, Kuta Padang, Kuta Tutong, Lampoh Drien, Alue Badeuk, serta Alue Keubeu Jagat. Kuta Tinggi, dipimpin oleh Teuku Lampoh U dan anaknya, Teuku Raja

Itam yang meliputi wilayah Mata Ie, Kuta Tinggi, Panton Seumancang, dan Paya.³⁶

Kenegerian Lhok Pawoh Utara atau Tangan-Tangan terdiri atas empat wilayah kenegerian, yaitu Suak, Tangan-Tangan Cut, Tangan-Tangan Rayeuk, dan Lhok Pawoh Utara. Namun Kreemer menambahkan satu daerah lagi, yaitu *uleebalang* Babah Lhok.³⁷ Kenegerian itu terletak di sepanjang pantai, mulai dari Kuala Sangkalan yang berbatasan dengan Susoh hingga Ujung Lhok Pawoh yang berbatasan dengan Manggeng.³⁸

Kenegerian Tangan-Tangan itu pada mulanya termasuk ke dalam wilayah Kenegerian Susoh, namun kemudian memisahkan diri. Suak dengan persetujuan Datuk Susoh memberi izin kepada Panglima Bantan dan Panglima Giri yang berasal dari XXV Mukim Aceh Besar untuk membuka perkebunan lada di daerah itu namun dengan syarat harus membayar pajak hasil panen lada. Kewajiban membayar pajak itu hanyalah dipenuhi selama dua tahun kemudian mereka tidak mau membayar lagi.³⁹

³⁶ J. Kreemer, *op. cit.*, hlm. 232.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 233.

³⁸ K.F.H. van Langen, *op. cit.*, hlm. 221.

³⁹ *Ibid.*

Datuk Susoh kemudian menyuruh Tok Kada selaku ketua kelompok petani lada dari XXII Mukim, Aceh Besar, yang membuka perkebunan lada di Lhok Pawoh Utara untuk memerangi kelompok Panglima Bantan dan Panglima Giri. Mereka kalah perang dan melarikan diri, lalu Datuk Susoh menyerahkan wilayah itu kepada Tok Kada. Demikian juga dengan dua wilayah lainnya, Tangan-Tangan Cut dan Tangan-Tangan Rayeuk yang diserahkan kepada Tok Kada, dengan persyaratan harus membayar pajak hasil lada dan setiap membuka lahan pertanian di daerah itu harus mendapat izin dari Tok Kada. Perjanjian itu hanya terlaksana selama dua tahun, setelah itu diingkarinya sehingga terjadilah peperangan antara Tok Kada dengan Datuk Susoh.⁴⁰

Peperangan tersebut berakhir dengan melakukan acara tukar asuh anak, antara anak Tok Kada yang bernama Cut Hajat dengan putera Datuk Bagak dari Susoh yang bernama Panglima Mak Tek. Cut Hajat kemudian dinikahkan dengan perempuan dari Susoh keturunan dari Minangkabau sedangkan Panglima Mak Tek dinikahkan dengan anak perempuan Tok Kada.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 221.

Pada tahun 1880 kerajaan negeri Tangan-Tangan menandatangani perjanjian singkat atau *korteverklaring* sebagai tanda tunduk kepada pemerintah Belanda. Pada sekitar tahun 1888, keempat wilayah *uleebalang* itu diperintah oleh seorang raja, yaitu Teuku Cut Ahmad bin Teuku Cut Hajat, yang telah menikah dengan puteri Tuanku Raja Kecil dari negeri Seuneuam yang termasuk ke dalam wilayah kabupaten Nagan Raya sekarang.

Pada waktu itu penduduk di wilayah itu berasal dari XXII Mukim, Aceh Besar dan sebagian lagi berasal dari Minangkabau. Mereka berdiam di keempat wilayah *uleebalang* itu dan sebagian lainnya terpencar di daerah perkebunan lada.⁴¹ Mata pencaharian utamanya adalah menanam padi di sawah dan berladang sedangkan penanaman lada mengalami kegagalan karena terjadinya peperangan serta tidak beresnya birokrasi pemerintahan. Hasil-hasil perdagangan di daerah ini juga diekspor melalui pelabuhan Susoh.

Negeri Manggeng meliputi pantai barat yang wilayahnya mulai dari Ujong Lhok Pawoh berbatasan dengan Lhok Pawoh Utara (Tangan-Tangan) hingga Kuala

⁴¹ *Ibid.*

Pawoh Baru di muara Krueng Baru yang berbatasan dengan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan sekarang. Negeri ini terdiri dari dua buah wilayah *uleebalang*, yaitu wilayah *uleebalang* Bak Weu, yang wilayahnya mulai dari Krueng Manggeng hingga Krueng Baru (berbatasan dengan Labuhan Haji, Aceh Selatan kini).

Uleebalang Manggeng wilayahnya dari sungai Krueng Manggeng hingga Lhok Pawoh (berbatasan dengan Tangan-Tangan). Kedua wilayah *uleebalang* itu di bawah pemerintahan seorang raja, Datuk Beusa. Manggeng awalnya merupakan bagian dari wilayah Susoh, akibat menyingkirnya Panglima Bantan dan Panglima Giri dari Suak karena kalah perang dengan Tok Kada. Akibat kekalahan itu, seluruh pengikutnya menyerah dan memohon kepada Datuk Susoh untuk diperbolehkan menetap di Manggeng.

Mereka diizinkan tinggal di wilayah itu dengan syarat harus memenuhi ketentuan yang berlaku dan mengakui Datuk Beusa sebagai kepala.⁴² Sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal, bahwa pada masa

⁴² *Ibid.*, hlm. 222.

pemerintahan Sultan Alauddin Jauhar Alam juga pernah mengirimkan ekspedisi penertiban ke negeri Manggeng.

Setelah Datuk Beusa meninggal dunia, ia digantikan oleh kedua anaknya sebagai penguasa di sana. Anaknya yang bungsu, Cut Hajat yang dilahirkan di Aceh Besar mendapat tugas untuk memimpin negeri Manggeng, karena abangnya mengalami kecacatan mental. Setelah Cut Hajat meninggal dunia, ia digantikan oleh adik sepupunya yang bernama Datuk Dolah yang mengambil alih tampuk kekuasaan. Akan tetapi karena perilakunya kurang terpuji, ia digantikan oleh sepupunya, anak Cut Hajat yang bernama Nyak Hasan yang menjadi raja di negeri Manggeng.⁴³

Berdasarkan keterangan dari sumber lokal menyebutkan bahwa Kerajaan Manggeng terdiri dari dua buah wilayah *uleebalang*, yaitu *uleebalang* Manggeng dan *uleebalang* Bak Weu. Kedua *uleebalang* itu diperintah oleh satu raja. Raja pertama yang memerintah di Kenegerian Manggeng itu adalah Datuk Beusa, diyakini masih ada hubungan famili dengan Sultan Iskandar Muda. Setelah Datuk Beusa meninggal, lalu digantikan oleh anaknya,

⁴³ *Ibid.*

Teuku Datuk Muda. Teuku Datuk Muda digantikan oleh Teuku Datuk Cut Amat lalu digantikan oleh Teuku Datuk Nyak Dolah. Teuku Datuk Nyak Dolah digantikan oleh Teuku Raja Geh setelah itu digantikan lagi oleh Teuku Sandang namun karena melakukan sesuatu kesalahan, Teuku Sandang diasingkan Belanda ke Batavia. Selama ia berada dalam pengasingan yang mengendalikan kerajaan adalah Teuku Cut Mamat, anak Teuku Raja Geh. Tidak begitu lama ia memerintah kemudian digantikan oleh Teuku Muda Nana dan pemangku Nyak Blang.

Setelah Teuku Sandang dikembalikan dari Batavia, ia diangkat kembali menjadi raja. Tidak lama ia memerintah kemudian digantikan oleh Teuku Raja Iskandar pada tahun 1933, sekaligus sebagai raja terakhir di Manggeng.

Di antara *uleebalang* yang memerintah di wilayah Bak Weu atau Kecamatan Lembah Sabil sekarang. Secara berturut-turut Nyak Makam, Teuku Lanta, Teuku Hasan, dan Panglima Angkop. Sedangkan *uleebalang* yang memerintah di wilayah *uleebalang* Manggeng berturut-turut yaitu, Teuku Cut Leh, Teuku Gara, Teuku Tawi, dan Teuku Sabi.

Pusat kerajaan Manggeng awalnya terletak di muara sungai Ujong Manggeng, di antara *gampong* Padang Meurandeh atau Padang Makmu yang berbatasan dengan *gampong* Alue Rambot. Pusat kerajaan ini kemudian pindah ke *gampong* Blang Manggeng lalu pindah lagi ke *gampong* Tokoh kemudian berpindah lagi ke *gampong* Padang dan terakhir di Keudai Manggeng.⁴⁴

Sedangkan wilayah *uleebalang* Bak Weu sekarang menjadi Kemukiman Suak Beurembang yang menjadi kecamatan Lembah Sabil. Wilayah *uleebalang* Manggeng menjadi Kemukiman Ayah Gadeng Kecamatan Manggeng. Akan tetapi karena terlalu luas Kecamatan Manggeng dimekarkan menjadi empat kemukiman. Manggeng menandatangani *korteverklaring* tanda tunduk kepada pemerintah Belanda pada tahun 1881.

Penduduk negeri Manggeng sebagian besar berasal dari XXV Mukim Aceh Besar dan bercampur dengan orang Aneuk Jamee (Minangkabau). Mereka mendiami Kampung Manggeng di barat sungai Krueng Manggeng dan di Bak

⁴⁴ Lihat *oral history* Teuku Syam dan Sudirman, dalam Zakaria Ahmad, (ed), *Negeri dan Rakyat Aceh Barat Daya Dalam Lintasan Sejarah Menuju Daerah Otonom*, (Blangpidie :Pemda Aceh Barat Daya), hlm.28.

Weu di selatan sungai Krueng Manggeng. Selebihnya mereka tersebar di ladang-ladang.

Mata pencaharian penduduk adalah menanam padi di ladang dan sedikit di sawah. Sedangkan tanaman lada tidak berkembang. Hasil-hasil perdagangan di daerah itu diekspor melalui pelabuhan Susoh.⁴⁵

Pada tahun 1900, pasukan Belanda melakukan invasi ke negeri Kuta Batee. Belanda dan kemudian membangun tangsi Marsose (bivak) tepat di atas kediaman dari Teuku Ben Mahmud *uleebalang* Kuta Batee. Tangsi ini ditempati sebanyak satu kompi pasukan marsose. Sebelumnya tangsi tersebut berdiri di Susoh. Semenjak Belanda menguasai kota ini, mereka kemudian mulai membenahi tatakota dan lambat-laun berkembang pesat sebagai kota perdagangan antarnegeri terutama perdagangan padi, tembakau dan candu.

Perkembangan *peukan* (pasar) Kuta Batee ini didukung oleh situasi keamanan dan kedudukan pusat militer pasukan Belanda di sana. Dengan adanya tangsi militer, maka banyak orang Belanda dan tentaranya yang datang ke sana, maka muncullah berbagai macam

⁴⁵ K.F.H. van Langen, *op. cit.*, hlm. 222-223.

kebutuhan hidup dan pertumbuhan kota. Munculnya para pedagang baru, terutama orang-orang Cina yang sebelumnya menjadi buruh pada pembuatan bangunan Belanda mulai beralih menjadi pedagang dan mengundang para pedagang lain datang ke kota ini.

Mereka mulai melakukan aktivitas perdagangan di sekitar bivak Belanda tersebut. Dalam perkembangannya ternyata para pedagang itu tidak hanya menyediakan kebutuhan para militer Belanda yang ada di daerah itu, tetapi juga untuk penduduk di sekitarnya termasuk dari daerah Gayo Lues.

Demikian juga dengan kedatangan para pedagang, tidak hanya terbatas dari orang Cina, tetapi juga diikuti oleh pedagang lainnya, baik yang berasal dari orang Minangkabau atau penduduk dari kenegerian yang berdekatan seperti Susoh dan Meukek. Hal demikian terjadi setelah tahun 1920-an semenjak selesainya jaringan jalan raya yang menghubungkan Kutaraja dengan Tapaktuan.

C. Penyebaran Cina di Aceh Barat Daya

Kedatangan Cina di Aceh Barat Daya, khususnya di Kuta Batee atau Blangpidie, berdasarkan *oral history* yang

pernah dilakukan disebutkan bahwa kedatangan Cina pada awalnya dikarenakan keterlibatan mereka dalam pembangunan tangsi militer Belanda di Kuta Batee dan pembangunan rumah *uleebalang* Susoh Datuk Nyak Raja.⁴⁶

Hal itu diperkuat dengan keberadaan Datuk Nyak Raja yang merupakan seorang *uleebalang* dan merangkap sebagai kontraktor yang sukses karena kedekatannya dengan kolonial sehingga ia juga dipercayakan untuk membangun tangsi Belanda di kota Kuta Batee sekitar tahun 1900. Selain itu, ia juga dipercayakan oleh Belanda dalam pembangunan jalan raya dari Kuta Batee hingga ke Seumayam di perbatasan dengan kabupaten Nagan Raya sekarang.

Pada saat itu Belanda banyak mempekerjakan para buruh dan pekerja Cina dalam pengerjaan kontruksi bangunannya, bahkan menurut sumber lokal rumah *uleebalang* Datuk Nyak Raja di Pante Perak Susoh, dibangun oleh pekerja Cina.

Sejak adanya tangsi Belanda di Kuta Batee, maka dimulailah aktivitas Belanda di sana dan sejak saat itu pula

⁴⁶ H.Said Abubakar, *Berjuang untuk Daerah: Otonomi Hak Azazi Insani*, Banda Aceh: Yayasan Nagasakti, 1995, hlm.17 dan wawancara dengan Nur Hayat di Blangpidie pada tanggal 21 April 2009.

aktivitas Cina di kota ini dalam membangun komunitas usaha dan perdagangan di sekitar tangsi yang digunakan sebagai pasar tradisional dalam mempertemukan pembeli dan penjual, walaupun keberadaan mereka masih sangat sedikit.

Pertumbuhan Kuta Batee mulai terlihat sejak tahun 1926, pada saat Belanda menduduki kota ini dibangun berbagai infrastruktur umum seperti pasar, lampu kota, fasilitas umum seperti hotel, rumah makan, kantor pos dan telegram, dan fasilitas olahraga seperti lapangan bulu tangkis, bilyar dan lapangan sepakbola.⁴⁷

Dengan adanya pasar, para pedagang di Kuta Batee dapat menjalankan bisnisnya dengan baik di sana. Selain itu para pedagang tembakau dan kerbau dari dataran tinggi Gayo juga dapat melakukan transaksi di sana sebagai pasar transit dari pelabuhan Susoh sebagai pelabuhan utama di sana.

Seiring dengan semakin membaiknya pertumbuhan Kuta Batee yang ditopang oleh perekonomian berbasis pertanian sawah yang membuat

⁴⁷ Wawancara dengan Prof.Drs.Zakaria Ahmad, di Banda Aceh pada tanggal 29 Mei 2009

daerah ini terkenal dengan *brand image breuh sigeupai* sebagai jenis varietas padi unggulan yang terkenal di sana.

Munculnya *plantation* kelapa sawit dan karet di perkebunan Seumayam membuat denyut perekonomian di Kuta Batee semakin membaik dan stabil. Hal ini ikut mendorong semakin ramainya komunitas pedagang di kota ini pada saat itu sehingga tumbuh sebagai pusat keramaian dari aktivitas perdagangan lokal seperti pasar, sekolah, usaha pertanian, perkebunan, pertukangan, dan peternakan.

Sejak saat itu, pusat kota ini didatangi para investor yang ingin berdagang di sana termasuk keberadaan pedagang Cina. Mereka menempati toko-toko di sekitar tangsi seperti jalan Perdagangan, jalan Sentral, jalan Persada. Sedangkan pedagang lokal lebih banyak berkonsentrasi di sekitar Pasar Ikan Lama dan jalan Selamat di kota Blangpidie sebagai nama baru dari Kuta Batee.

Permasalahan utama yang sering terjadi di kota Blangpidie adalah masalah kebakaran. Kebakaran kota ini telah terjadi berulang kali yang menghancurkan kota ini karena disebabkan penggunaan konstruksi bangunan pertokoan yang berbahan baku utama kayu. Hal ini yang

menyebabkan sering terjadinya perubahan pada tatakota dan wajah kota. Tidak banyak wujud asli yang tersisa, kecuali satu deretan toko yang membujur dari barat ke timur di Jalan Selamat yang dapat bertahan hingga tahun 2002. Akhirnya deretan toko kayu inipun satu per satu, mulai dirobohkan, dan berubah menjadi kontruksi permanen dengan pola bangunan ruko yang berlantai satu, dua, tiga sampai empat. Mulai tahun 2002 pasca kebakaran besar yang melanda kota Blangpidie pada tahun 2001 kota ini menjadi pertokoan permanen. Kini, selain berdagang, pedagang Cina di kota ini juga mengusahakan peternakan sarang burung walet, terutama di lantai tiga dan empat toko milik mereka.

BAB III

KONDISI SOSIAL BUDAYA ACEH BARAT DAYA

A. Keadaan Etnis Cina

Kehidupan anggota masyarakat Cina di manapun mereka berada masih saja diselimuti tradisi dari tanah leluhurnya. Masalah kehadiran orang Cina dalam lingkungan masyarakat Aceh Barat Daya merupakan suatu permasalahan yang belum berakhir, walaupun di permukaan terlihat seperti adanya jalinan harmonisasi. Sekalipun mereka telah menanggalkan identitas sebagai orang Cina dan mengidentifikasikan diri sebagai golongan keturunan yang sudah terasimilasi secara kultural, namun mereka tetap dianggap sebagai orang Cina. Mereka sepenuhnya belum dapat diterima sebagai bagian internal dari warna negara Indonesia.¹

Kuatnya orientasi dan identifikasi diri orang Cina terhadap kebudayaan leluhur sering dinilai sebagai kendala yang menyebabkan kurangnya *sense of belonging* dan loyalitas terhadap daerah atau negara di mana mereka

¹Leo Suryadinata, *Pribumi Indonesian: the Chinese Minority and China*, (Singapore: Hernemann, 1986), hlm.191.

tinggal. Sekalipun telah memiliki status warga negara Indonesia ternyata mereka lebih loyal terhadap negeri leluhur dan cenderung mengorganisasikan dirinya dalam ikatan organisasi yang berbau kebudayaan Cina.² Sikap dan perilaku mereka berdasarkan pada konsep hidup menurut ajaran Konfusius dan Tao. Ajaran Konfusius dan Taoisme ini menjadi dasar dan warna dominant dalam perilaku hidupnya. Konfusianisme yang menitikberatkan pada Li, yaitu tingkah laku seseorang dalam kehidupannya sehari-hari harus dipelihara.

Kesempurnaan hidup dipandang sebagai suatu proses yang panjang dari asal mula kehidupan sampai akhir atau kematian yang memisahkan jasad dengan roh. Keseluruhan alam semesta pada dasarnya telah mendapat tempat dan tugas masing-masing, yang kemudian membentuk pola dasar kosmos yang berdasar pada ketentuan alam yang ada.

Dalam perspektif ajaran Konfusianisme, alam memiliki dua hal yang saling berlawanan, seperti baik-buruk, terang-gelap, air-api, bumi-langit, laki-laki-

²Louis Mitchison, *The Overseas Chinese : A Background Book*, (London : The Bradley Head, 1961), hlm. 29-35.

perempuan dan lain sebagainya. Dua konsep ini dituangkan dalam Ying dan Yang yang divisualisasikan dengan sebuah lingkaran merah dan putih.

Konsep Ying dan Yang menyiratkan pengertian bahwa antagonisme alam tetap berada pada satu kesatuan semesta. Keberadaan aspek yang satu tidak terlepas dari yang lain. Ia merupakan kesatuan komponen alam yang saling berkomplemen. Dalam pengertian lebih lanjut, konsep ini memberikan pemahaman mengenai prinsip kesatuan dunia yang masing-masing aspeknya tidak terpisahkan satu sama lain.³

Dalam filsafat Tao, ajaran pokoknya adalah tentang kebenaran dan kesalahan.⁴ Dalam pandangan tersebut, setiap kebenaran pasti mengandung kesalahan, demikian juga sebaliknya, setiap kesalahan pasti didalamnya mengandung kebenaran. Dengan kata lain tidak ada di dunia ini yang bersifat mutlak, baik kebenaran maupun kesalahan. Ia merupakan proses yang tiada akhir dengan transformasi persentase atas unsur-unsur yang ada. Oleh karena itu untuk memahami fenomena alam, sikap

³Hidayat ZM, *Masyarakat dan Kebudayaan Cina di Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1984) hlm. 25.

⁴*Ibid.*

bijaksana menjadi nilai yang sangat diperlukan, terutama untuk memahami perubahan-perubahan alam semesta.

Dibanding dengan masyarakat lokal, golongan ini hanya merupakan sebagian kecil saja, namun mereka menguasai kehidupan ekonomi masyarakat Blangpidie. Tempat tinggal mereka merupakan suatu kompleks yang berpusat di kelurahan Pasar Blangpidie, yang merupakan pusat kota dan pusat perdagangan. Sebagian terbesar golongan ini mempunyai mata pencahariannya di bidang perdagangan; kita dapat melihat dari penjual kebutuhan sehari-hari sampai pengusaha-pengusaha pabrik dan bahkan banyak perkebunan-perkebunan sawit dikuasai oleh golongan ini. Ada pula dari golongan ini yang menjadi pegawai negeri tetapi jumlahnya sedikit saja dan itupun golongan peranakan. Sebenarnya dalam masyarakat Cina ini ada dua golongan yang mempunyai sifat-sifat yang berbeda, yaitu golongan asli, umumnya berkewarganegaraan RRC dan golongan keturunan yang sebagian besar menjadi WNI.⁵ Antara kedua golongan ini terdapat perbedaan-perbedaan dalam tatacara dan pandangan hidupnya.

⁵ Onghokkam, *Pertumbuhan Kapitalisme Cina Perantauan di Indonesia*, dalam *Prisma No.4/XIX*, 1990, hlm.22.

Golongan asli mempunyai organisasi tersendiri yang bergerak terutama di lapangan sosial, misalnya membantu orang-orang asli yang sudah tua, membantu kegiatan Cina, terutama sebagai penghubung antara anggota-anggotanya dengan Pemerintah dalam urusan-urusan pribadi serta penghubung dengan perwakilan RRC di Indonesia. Dulu mereka mempunyai sekolah sendiri yang selevel dengan SD, SMP, dan SMA dengan sistem pelajaran yang disesuaikan dengan pendidikan di RRC, ditambah dengan pelajaran bahasa Indonesia. Semua murid di sekolah ini adalah warga negara RRC.

Kepentingan golongan asli ini terutama terletak di bidang ekonomi. Mereka berdagang untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dan setelah keadaan mengizinkan orang-orang ini akan pulang ke negeri leluhur (daratan Cina). Mereka masih mempunyai ikatan yang erat dengan tanah airnya, dan hampir seluruh golongan ini masih menganut agama yang dibawanya, Konfusius. Akibatnya mereka kurang menyelami cara hidup masyarakat setempat, dan dalam kebudayaan dan kehidupan ekonominya tetap merupakan golongan tersendiri.

Golongan yang lain adalah peranakan, dibandingkan dengan golongan asli mereka lebih banyak menyesuaikan diri dengan masyarakat Aceh Barat Daya. Dari kelompok peranakan sudah banyak yang beragama Katholik ataupun Protestan, bahkan ada beberapa di antara mereka yang masuk Islam karena perkawinan dengan penduduk lokal.

Meskipun sudah menganut agama lain, mereka masih turut merayakan hari-hari besar atau hari raya agama Kong Hu Chu atau Konfusius sebagai tradisi tanpa melakukan sembahyang di Klenteng. Di antara golongan keturunan ini sudah ada yang melakukan hubungan perkawinan dengan masyarakat setempat dan lebih banyak bila dibandingkan dengan perkawinan antara Cina asli pada masa lalu, seperti halnya dengan golongan asli, kehidupan golongan keturunan ini juga masih mengandalkan bidang perdagangan sebagai sistem perekonomiannya.

Etnis Cina keturunan mempunyai organisasi sendiri, yaitu Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia. Mereka sudah menyebar ke daerah-daerah termasuk ke kota Blangpidie, Aceh Barat Daya yang

berdirin sejak tahun 1955. Badan ini bergerak di bidang sosial, pendidikan dan politik, misalnya mengurus soal-soal kewarganegaraan, lagi pula soal-soal kepentingan antara para anggotanya dengan Pemerintah dan urusan sekolah-sekolah. Dibanding dengan golongan asli, orang keturunan lebih banyak yang menjadi anggota organisasi massa dan sosial, sebab dari golongan intelek keturunan banyak yang sudah beragama Katholik maupun Protestan.

Etnik Cina pada umumnya, baik asli maupun keturunan, mempunyai kelebihan daripada masyarakat lokal dalam hal tata cara mereka berdagang di Aceh Barat Daya. Mereka lebih tahan menderita rugi, lebih bersatu dalam kerjasama di bidang perdagangan, dan mereka selalu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaannya. Mungkin karena selalu melihat kesibukan orang-orang tua mereka, maka anak-anak Cina lebih maju dalam belajar daripada anak-anak lokal.

B. Keadaan Etnis Lainnya

Masyarakat Aceh Barat Daya terdiri dari beberapa etnik, seperti Aceh, Pidie, Aneuk Jamee yang masing-

masing masih menjalani kehidupannya dalam suasana tradisi yang sangat kental. Tata tertib dalam masyarakat dan kehidupan yang harmonis bagi masing-masing individu merupakan harapan dan gambaran kehidupan ideal yang dicita-citakan di sana. Tugas moral sebagai individu dalam masyarakat adalah menjaga keselarasan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban sosial yang ada. Kewajiban-kewajiban sosial ini menyangkut hubungan sosial, yaitu hubungan antar individu yang di dalamnya terdapat pola hubungan yang hierarkis. Pola hierarkis ini didasarkan pada faktor-faktor perbedaan otoritas, kekayaan, status sosial, peran sosial, usia, keturunan, dan lain sebagainya.⁶

Solidaritas dan kebersamaan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan warga Indonesia lokal. Meskipun pola hubungan yang terjadi bersifat hierarkis, namun rasa kekeluargaan di antara mereka tetap terjalin baik. Tolong-menolong atau *meuseuraya* atau gotong royong dan *duek pakat* (musyawarah) dalam mengatasi setiap permasalahan yang

⁶ Nield Mulder, *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1986), hlm.38.

dihadapi bersama menjadi kultur yang sering dilakukan oleh masyarakatnya.

Mayoritas masyarakat Aceh Barat Daya menganut agama Islam dan tekun menjunjung tinggi kulturnya, sehingga dapat dimengerti kedudukan seorang ulama atau *teungku*, seperti *Imuem Meuseujid* dan *Imuem Meunasah* sangat penting dalam masyarakatnya. Terutama di *gampong-gampong* di Blangpidie pengaruh *teungku* ini sangat besar, bukan saja hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan, kesulitan-kesulitan lain yang menyangkut permasalahan kehidupan sehari-hari seseorang juga akan meminta petunjuk dari *teungku*.

Hampir tidak ada masyarakat lokal Aceh Barat Daya yang memeluk agama selain Islam. Pemeluk agama Katholik dan Kristen mayoritas etnis Cina ataupun pendatang dari luar Aceh. Kuatnya pengaruh Islam, terlihat dengan keberadaan partai-partai politik yang pengaruhnya masih didominasi partai-partai Islam, maka di Aceh Barat Daya selama penyelenggaraan Pemilu sejak tahun 1955 sampai 1982, partai-partai ini mendapat konsituen yang sangat besar di sana.

Ketika pemerintah Orde Baru menggerakkan kinerja mesin politik Golongan Karya sampai ke pelosok tanah air, maka sejak Pemilu tahun 1987, partai ini menjadi pemenang baru kontestan Pemilu Aceh. Sejak saat itu, konstituen dari kalangan ulama terhadap partai Islam mulai berkurang bahkan banyak yang direkrut menjadi pendukung ideologi golongan ini. Akibatnya banyak ulama tradisional atau *teungku* yang awalnya setia pada garis politisnya, menjadi kehilangan kepercayaan dari masyarakat setelah direkrut ke dalam kancah politik yang menyebabkan *dayah* atau pesantren tradisional termarjinalkan di sana.

Sejak reformasi tahun 1998 dan pemekaran wilayah sejak tahun 2002 peran beberapa ulama di Aceh Barat Daya semakin bergeser dengan masuknya ke arena politis fraktis dan banyak yang beralih menjadi anggota legislatif di DPRD Kabupaten Aceh Barat Daya. Akibatnya terjadi politisasi terhadap *dayah* di sana karena dianggap sebagai basis dalam meraup suara yang signifikan bagi calon legislatif.

Setelah tsunami dan perdamaian maka sejak tahun 2007 partai lokal khususnya Partai Aceh mendominasi

perolehan suara dalam pilihan kepala daerah langsung, sedangkan dalam pilihan langsung nasional didominasi oleh Partai Demokrat.

Dilihat sepintas lalu kehidupan perekonomian masyarakat Aceh Barat Daya tidak terlalu menyedihkan. Mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani, pedagang, tukang, karyawan dan pegawai swasta maupun pegawai negeri. Pertokoan dan perusahaan kebanyakan dikuasai golongan Cina, Minangkabau (Aneuk Jamee) dan Pidie. Masyarakat lokal mempunyai tanah pertanian atau toko-toko dan selebihnya menjadi agen atau pedagang eceran atau *muge*. Selanjutnya adalah pekerja serabutan. Sisanya dengan jumlah yang relatif kecil adalah pemilik perusahaan dan perkebunan atau bekerja di kantor-kantor pemerintah sebagai PNS maupun pegawai swasta.

Dalam dunia pendidikan di tataran lokal semangat belajar anak-anak golongan lokal, sekarang ini lebih besar bila dibandingkan dengan anak-anak dari etnis Cina. Hal ini mungkin ini disebabkan semakin besarnya perhatian orangtua kepada pendidikan modern anaknya, dan beranggapan, bahwa tanpa bersekolah anak-anak mereka

nantinya tidak bisa mandiri, sehingga mereka menggantungkan masa depannya melalui jalur pendidikan.

Sedangkan anak-anak etnis Cina jenjang pendidikan mayoritas hanya sampai di SMA karena mereka lebih fokus kepada perdagangan yang dimiliki oleh orangtuanya atau membangun perusahaan baru milik keluarga, mungkin hal itu terjadi karena mereka selalu berpandangan optimis. Pada etnis Cina dewasa terlihat kegemaran untuk selalu memperlihatkan kepada luar akan hal-hal yang baik meskipun keadaan ekonomi keluarganya sebaliknya.

Ketika era 1980-an, para karyawan Cina masih suka berpakaian yang bagus dengan warna yang mencolok, tempat-tempat pertunjukan seperti Panggung Hiburan Rakyat (PHR) seperti Purnama Raya, Astana Ria, dan Bintang Dua selalu penuh dengan penonton-penonton. Pada malam minggu atau malam pemutaran film *box office* di Aceh Barat Daya khususnya kota Blangpidie disesaki dengan orang-orang dari *gampong* di sekitar dengan berpakaian terbaik yang mereka miliki.

Majikan dari kelompok Cina mengatakan bahwa bila pekerja etnis lokal di tempat mereka diberi hadiah

uang Tunjangan Menjelang Puasa dan Hari Raya, yaitu pada saat akan menyambut bulan suci Ramadhan yang disebut *Mak Meugang Puasa*, atau ketika menjelang hari raya yang disebut *Mak Meugang Uro Raya*. Pada saat hari raya mereka tidak masuk kerja sampai beberapa hari. Saat kembali masuk kerja meminjam uang atau beras kepada majikannya.

C. Hubungan Antara Cina dan Etnis Lainnya

Dalam jalinan kehidupan sehari-hari, hubungan antara Cina dan etnis lainnya, di mana orang-orang Cina dan masyarakat Aceh Barat Daya terjadi dalam hal jual beli barang dan jasa.⁷ Pada umumnya di Aceh Barat Daya, orang-orang Cina menjadi pemilik perusahaan atau pemilik took sedangkan etnik lain di Aceh Barat Daya datang sebagai pembelinya, sebaliknya di pasar tradisional etnis lainnya sebagai penjual dan etnis Cina kadangkala sebagai pembeli. Di sini mereka terjalin hubungan yang baik dan tidak pernah terjadi perselisihan. Demikian pula hubungan antara agen Cina dengan petani Aceh Barat Daya yang datang dari *gampong-gampong* di sekitar Aceh Barat

⁷ Wawancara dengan Zulfikar pada tanggal 21 April 2009 di Blangpidie.

Daya. Agen-agen petani yang terdiri dari orang Cina merupakan langganan tetap yang tidak diabaikan posisinya.

Hubungan etnis lain di Aceh Barat Daya dengan etnis Cina di Aceh Barat Daya terjadi dalam bidang olahraga. Sebelum tahun 1960-an, keberadaan etnis Cina dalam kesebelasan sepakbola Persada Aceh Barat Daya. Demikian pula dalam perkumpulan olahraga bulutangkis sampai saat ini, etnis Cina dan etnis lainnya selalu bermain bersama-sama.

Selanjutnya bila seorang etnis Cina mengadakan pesta perkawinan dan kematian, mereka juga mengundang etnis lainnya di sekitar tokonya. Dalam hal ini, mereka khusus menyediakan makanan dan masakan tersendiri yang sesuai dengan kuliner muslim, karena pada umumnya beragama menganut agama Islam. Bagi etnis Cina yang mengadakan kenduri baik itu perkawinan atau kematian, maka kedatangan pejabat tinggi pemerintah lokal merupakan suatu penghormatan yang cukup besar terhadap mereka.

Demikian pula, apabila masing-masing golongan sedang merayakan hari rayanya, maka terjadi sikap saling

hormat-menghormati. Pada saat perayaan *Uro Raya Puasa* atau hari raya Idul Fitri dan *Uro Raya Haji* atau hari raya Idul Adha, etnis Cina menutup toko dan usaha mereka. Mereka berkunjung kepada masyarakat muslim di lingkungannya. Sedangkan bila tiba saatnya hari raya Waisak dan Cap Go Meh, maka masyarakat muslim di Aceh Barat Daya tetap mempersilahkan etnis Cina merayakan dan menutup toko dan usahanya.

Dalam perkawinan pun, saat ini telah terjadi antara etnis lokal lainnya dengan peranakan Cina yang sudah menganut agama Islam. Kadangkala laki-laki dari etnis lokal lainnya sedangkan perempuannya dari etnis Cina. Kadangkala perempuannya dari etnis Cina dan laki-laknya dari etnis lokal lainnya.

Hubungan demikian umumnya terjadi pada lapisan masyarakat tingkat bawah. Istri atau suami dari etnis lokal dari Aceh Barat Daya yang melakukan perkawinaan secara sah di hadapan penghulu di Kantor Urusan Agama, dan tentu saja diharuskan terlebih dahulu memeluk Islam, yang dipersaksikan oleh *teungku imuem* dan panitia Mesjid di mana prosesi "*pensyahadatan*" itu dilaksanakan.

Dalam perusahaan-perusahaan milik etnis Cina tidak semua buruhnya etnis Cina, mereka juga mempekerjakan juga etnis lokal lainnya di Aceh Barat Daya, baik itu perusahaan kecil dengan 2-3 pegawai maupun pada perusahaan yang skala menengah. Mengenai hubungan antara majikan etnis Cina dan pekerja dari Aceh Barat Daya diperoleh keterangan bahwa masih ada diskriminasi khususnya dalam upah, di mana pekerja Cina yang memiliki kedudukan sama dengan buruh dari etnis lokal lainnya justru memperoleh upah yang lebih tinggi.⁸

Di kalangan anak-anak sekolah, Cina dan etnis lokal lainnya di Aceh Barat Daya sudah mulai adanya hubungan dan kerjasama. Hal ini disebabkan karena sekolah Cina sudah tidak ada lagi sekolah sehingga siswa Cina harus bersekolah di SD, SMP, dan SMA negeri sama dengan siswa dari etnis lokal lainnya dari Aceh Barat Daya, sehingga dapat bergaul dengan baik.

Pada saat Aceh telah menerapkan syariat Islam, diberi kebebasan bagi siswi etnis Cina untuk boleh tidak

⁸ Wawancara dengan Safrizal pada tanggal 22 April 2009 di Blangpidie.

menggunakan jilbab atau pakaian muslimah di sekolah negeri, namun tetap memakai celana dan rok panjang.

Dalam masyarakat Aceh Barat Daya terdapat dua hal yang inheren, yakni masalah integrasi dan disintegrasi. Keduanya muncul bersamaan seiring dengan terjadinya keinginan kolektif dan perbenturan kepentingan di antara anggota masyarakat.⁹ Untuk tujuan dan kepentingan kolektif, anggota masyarakat menjalani kehidupannya sesuai dengannilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang telah disepakati bersama.

Nilai-nilai ini termanifestasi dalam bentuk norma atau tertib sosial yang mengatur interaksi sosial antar anggota masyarakat. Namun demikian dapat dipungkiri bahwa tidak semua perbedaan dan ketegangan-ketegangan yang ada pada masyarakat dapat teratasi oleh tertib sosial yang berlaku¹⁰.

Perbedaan-perbedaan dan ketegangan-ketegangan yang merupakan penyimpangan dari sistem sosial

⁹David Loockwood, "Some Remarks on The Social System, dalam N.J. Demereth III, et al., *System, Change, and Conflict*, (London: Collier MacMillan, 1967), hlm.284

¹⁰Ralf Dahrendorf, *Case and Class Conflict in Industria Society*, (Stanford California:Stanford University Press, 1959), hlm.162

senantiasa muncul dan seringkali menjelma menjadi faktor atau katalisator perubahan yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, lebih-lebih jika ketegangan itu berkembang secara kumulatif hingga masyarakat terpolarisasi, maka kejadian-kejadian sosial yang mencerminkan perubahan radikal cenderung dapat terjadi. Konflik sosial yang terpendam dapat muncul kepermukaan berubah menjadi konflik terbuka yang seringkali diikuti oleh tindakan-tindakan kekerasan yang bertentangan dengan tertib sosial dan hukum yang berlaku.¹¹

Hubungan antara masyarakat etnis lokal lainnya dan masyarakat etnis Cina di Aceh Barat Daya dapatlah dikatakan diliputi oleh konflik sosial terpendam. Konflik sosial terpendam ini disebabkan oleh adanya perbedaan di beberapa aspek esensial antara mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai anggota masyarakat yang secara teritorial hidup berdampingan dalam satu wilayah geografi yang sama, mereka ini terpisah secara kultural. Masing-masing dari mereka saling mengembangkan norma-norma, sistem sosial, dan sistem nilai kelompok yang berlainan satu sama lain.

¹¹*Ibid.*

BAB IV
CINA DALAM LINTAS PERDAGANGAN
DI ACEH BARAT DAYA 1900-2008

Keberadaan etnis Cina dalam lintas perdagangan Aceh Barat Daya, khususnya di kota Blangpidie memang menarik untuk dikaji. *Pertama*, menyangkut sensitivitas masalah minoritas yang menyangkut etnis, agama dan ras yang sangat berbeda dengan kelompok mayoritas. *Kedua*, latar belakang historis dan cara pandang mereka serta pengalaman hidup mereka di bumi nusantara ini, tidak bisa begitu saja dapat digeneralisasikan karena masing-masing daerah memiliki spesifikasinya masing-masing.

Perilaku dan kultur dalam perdagangan dari kelompok etnis Cina di kota Blangpidie dan daerah-daerah lainnya di Indonesia merupakan perilaku yang saling terkait satu dengan yang lainnya, namun memiliki fenomena masing-masing.

Etnis Cina di Aceh Barat Daya dengan perilaku perdagangannya disadari atau tidak dalam kenyataannya telah menyumbangkan beragam kegiatan perekonomian bagi bangsa Indonesia, khususnya di kota Blangpidie baik

yang berefek positif maupun negatif. Sedangkan budaya eksklusifnya memperkaya keunikan khasanah budaya bagi keragaman bangsa Indonesia.

Mengenai masalah perdagangan etnik Cina, *Fujitsu Research* di Tokyo mengamati daftar perusahaan-perusahaan di enam negara kunci di Asia, yang di dalamnya digambarkan betapa perusahaan-perusahaan tersebut secara mayoritas dikuasai oleh etnis Cina perantauan, misalnya di Thailand sebanyak 81%, Singapura sebanyak 81%, dan di Indonesia sebanyak 73% dan lain-lain.¹

Gambaran tersebut membuktikan betapa berpengaruhnya peran perdagangan etnis Cina dalam perekonomian di Indonesia, khususnya di kota Aceh Barat Daya. Telah menjadi suatu ketentuan atau syarat utama kesuksesan suatu pembangunan ekonomi, bahwa partisipasi ekonomi semua pihak yang harus terlepas dari kasus primordialisme termasuk masalah etnis, dan agama di dalamnya. Sebab adanya stereotipe-stereotipe negatif tentang peran ekonomi etnis Cina dalam masyarakat akan

¹ Naisbitt, J. *Megatrends Asia*, (New York: Touchstone Rockefeller Center, 1997), hlm.19-20.

mengganggu pertumbuhan ekonomi, khususnya stereotipe negatif yang berhubungan dengan peran ekonomi mereka.

Selama Orde Baru berjaya dalam tiga dekade lebih, selama itu pula etnis Cina banyak mengalami diskriminasi secara politis. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya beberapa peraturan yang mengatur eksistensi etnis Cina di seluruh wilayah Indonesia, yaitu dengan dikeluarkan beberapa kebijakan pemerintah, antara lain;

1. Keputusan Presiden Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966 tentang masalah penggantian nama.
2. Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IV/6/1967 tentang Kebijakan Pokok Penyelesaian Masalah Cina yang wujudnya dibentuk dalam Badan Koordinasi Masalah Cina, yaitu sebuah unit khusus di lingkungan Bakin.
3. Surat Edaran Presidium Kabinet RI No. SE-06/PresKab/6/1967, tentang kebijakan pokok WNI keturunan asing yang mencakup pembinaan WNI keturunan asing melalui proses asimilasi terutama untuk mencegah terjadinya kehidupan eksklusif rasial, serta adanya anjuran supaya WNI keturunan asing

yang masih menggunakan nama Cina diganti dengan nama Indonesia.

4. Instruksi Presidium Kabinet No.37/U/IN/6/1967 tentang tempat-tempat yang disediakan untuk anak-anak WNA Cina di sekolah-sekolah nasional sebanyak 40% dan setiap kelas jumlah murid WNI harus lebih banyak daripada murid-murid WNA Cina.
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.455.2-360/1968 tentang penataan Kelenteng-kelenteng di Indonesia.
6. Surat Edaran Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika No.02/SE/Ditjen/PP6/K/1988 tentang larangan penerbitan dan pencetakan tulisan/iklan beraksen dan berbahasa Cina.²

Perjalanan etnis Cina di dalam sejarah bangsa Indonesia, memang perlu diperhatikan menyangkut hak dan keadilan berbangsa yang diterima oleh etnis Cina. Keberadaan etnik Cina sudah mendarah daging dalam perjalanan sejarah Indonesia yang dimulai sejak dari zaman Belanda, Orde Lama, Orde Baru hingga masa Reformasi.

² *Kompas*, Minggu, 6 Februari 2000, hlm.9.

Pada tataran lokal, sejarah etnis Cina di Aceh Barat Daya telah dimulai tahun 1900. Namun aktivitas perdagangan mereka mulai menggeliat sejak tahun 1930-an sampai saat ini. Perdagangan etnis Cina di kota Blangpidie Aceh Barat Daya sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka dalam situasi dan kondisi politik, pertahanan dan keamanan dan kehidupan sosial masyarakat.

Seperti yang dikemukakan oleh Robbins, bahwa persepsi individu ataupun sekelompok orang merupakan suatu proses di mana individu atau suatu kelompok mengorganisir dan menerjemahkan kesan sensorik mereka untuk memberikan tanda bagi lingkungan mereka.

Terlepas dari pengukuran seseorang berjiwa nasionalis ataupun bukan, hal ini terkait dengan salah satu kebutuhan dasar hidup manusia menyangkut keselamatan dan keamanan etnis Cina di Aceh Barat Daya. Selain itu persepsi tentang etnis Cina juga tergantung stereotipe yang beredar di kalangan masyarakat lokal tentang etnis Cina di Indonesia.³

³Robbin Robbins, S. P., *Organizational Behaviuor*, (New Jersey: Prentice Hall, 1991), hlm.125

Pembentukan persepsi tentang etnis Cina di Aceh Barat Daya terkait dengan karakteristik pribadi mereka, terutama dalam menyikapi situasi lingkungan yang mereka hadapi, dengan motivasi tertentu terutama untuk mendapatkan keamanan dan kesejahteraan hidup, bahkan kemapanan. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh latar belakang pengalaman masa lampau, yang merupakan dasar untuk melangkah maju meraih harapan-harapan hidup mereka di masa kini dan yang akan datang. Oleh sebab itu, perlu mengetahui akar sejarah etnis Cina, sebagai pengetahuan untuk memahami perdagangan serta budaya etnis Cina di Aceh Barat Daya.⁴

Untuk mendalami sejarah perdagangan etnis Cina di Aceh Barat Daya dapat dilihat dalam tiga era, yaitu perdagangan era maritim, era daratan, dan era kontemporer.

A. Perdagangan Era Maritim

1. Perdagangan Periode 1900-1941

Pada era ini dalam bidang agraria etnis Cina masih dibatasi kepemilikan modalnya. Kecuali di pulau Bangka di

⁴Wawancara dengan A Polem di Blangpidie pada tanggal 22 April 2009

Kalimantan Barat, dan beberapa lokasi di pulau Sumatera serta pulau Jawa.

Di Aceh, keberadaan etnis Cina dikarenakan keinginan Belanda untuk menggerakkan perekonomian mereka sehingga pemimpin sipil dan militer Belanda saat itu, yaitu Kolonel Herbertus Pel, menghimbau kepada investor Cina di Penang dan di Jawa untuk menanamkan modal dan melakukan perdagangan di Aceh.⁵ akibat kondisi zaman *malaise* itu mulai ada pergeseran peran perekonomian di mana etnis Cina beralih menjadi tengkulak, pedagang ikan, atau pemilik penggilingan beras.

Demikian juga munculnya dominasi dalam perdagangan eceran oleh etnis Cina, pada tingkat yang lebih rendah daripada Belanda. Profesi ini diikuti pula oleh peran sebagai tengkulak dan penjaja keliling kecil-kecilan (*muge*). Bisnis di bidang keuangan hanya bersifat tengkulak, pegadaian pada level bawah yang tidak berbentuk perbankan. Industri pabrik kretek, batik dan tekstil kecil juga dimiliki oleh etnis Cina ini, sedangkan

⁵⁵Indriani, "Migrasi dan Kegiatan Ekonomi Suku Bangsa Cina Di Aceh Pada Masa Kolonial Belanda 1873-1930" dalam *Buletin HABA*, No.10/99, Banda Aceh: BKSNT, Hlm.17-22

pribumi sebagian besar masih berkuat di bidang agraria dan dinas-dinas pemerintah Hindia Belanda.

Etnis Cina yang sudah berpendidikan mulai menekuni bidang-bidang yang terspesialisasi, misalnya dokter, akuntan dan pengajar. Mereka yang bekerja sebagai kuli, atau buruh kasar baik yang terampil ataupun tidak, mulai menyusut jumlahnya. Selain itu, banyak yang bekerja di perusahaan-perusahaan Cina.⁶ Pada periode tahun 1900-an, sebagian besar etnis Cina bekas kuli telah berganti peran menjadi pedagang dan usahawan dalam perdagangan kecil-kecilan atau industri berskala kecil yang menyisihkan para pedagang dan pengusaha kecil lokal, tetapi tidak dengan pengusaha Belanda.

Di kota Blangpidie, Aceh Barat Daya kondisi nasional ini juga mempengaruhi para kuli Cina yang bekerja pada Belanda yang sebelumnya menjadi buruh pada pengerjaan tangsi militer dan rumah *uleebalang* Datuk Nyak Raja juga beralih menjadi pedagang perantara, seperti berdagang untuk kebutuhan Belanda maupun

⁶Mackie, J.A.C. Peran Ekonomi dan Identitas Etnis Cina Indonesia dan Muangthai dalam Wang Gung Wu dan Jennifer Cushman, *Perubahan Identitas Orang Cina di Asia Tenggara*, Jakarta: Pustaka Utama Grafika, 1991), hlm.322-323

kebutuhan masyarakat lokal. Keluwesan mereka dalam bidang perdagangan menyebabkan beberapa di antaranya muncul sebagai perintis usaha perdagangan etnis Cina di kota Blangpidie. Pada mulanya mereka hanya berkonsentrasi di sekitar tangsi militer di jalan Perdagangan dan jalan Sentral sekarang. Jumlah mereka tidak banyak, namun keberadaannya dalam perdagangan perantara sangat dominan.

2. Perdagangan Periode 1941-1958

Sejak kapitalisasi dilakukan di seluruh wilayah Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda, maka para investor mulai membuka *plantation* di daerah-daerah. Di sekitar Aceh Barat Daya mulai muncul perusahaan-perusahaan asing dengan jaminan keamanan dari pemerintah Hindia Belanda dan pihak swasta asing menjadi dominan dalam sektor ekonomi utama, seperti perkebunan sawit, karet, perdagangan candu dan kain serta lain-lainnya.

Munculnya perkebunan kelapa sawit dan karet di Seumayam membuat perubahan peran ekonomi etnis Cina, yang saat itu sedikit demi sedikit memasuki usaha grosir dan ekspor impor melalui pelayaran laut yang waktu itu

masih didominasi Belanda melalui pelabuhan Susoh. Kemajuan ini juga dipengaruhi oleh mobilisasi tenaga kerja dari daerah lain seperti Jawa ke perkebunan sawit dan karet di sana. Perkembangan ini kemudian diikuti oleh tumbuhnya lembaga-lembaga swasta kecil yang dimiliki oleh etnis Cina, dan muncul juga perdagangan pertekstilan.⁷

Dalam bidang pelayaran menjadi sektor utama yang secara luas dipegang oleh etnis Cina masa itu dan bekerjasama dengan penguasa lokal sehingga di Susoh lahir bisnis pelayaran EMKL yang dimiliki Datuk Nyak Raja, namun usaha ini semakin lama semakin melemah seiring dengan dimulainya sistem peralihan distribusi barang dan jasa dari laut ke darat. Pada bidang jasa dan profesipun secara kuantitatif meningkat, tetapi untuk dinas pemerintahan dan kemiliteran, secara kuantitas hampir tidak ada.

Bagi etnis Cina, pada masa ini terjadi pergeseran peran dari tenaga kasar, misalnya sebagai kuli bangunan menjadi tenaga kerja terhormat yang pekerjaannya memiliki status atau gengsi yang lebih tinggi dan lebih

⁷*Ibid.*

membutuhkan keterampilan, misalnya penata rambut, pedagang kelontong, pengusaha perbengkelan, toko sepeda, pengrajin emas, pengusaha warung mie, dan lain-lain.

Pada saat Jepang masuk ke Aceh Barat Daya khususnya Blangpidie pada tahun 1942, Belanda menyingkir ke Lawe Butar di perbatasan Sumatera Utara. Pada saat Aceh Barat Daya di bawah pendudukan balatentara Jepang, pedagang Cina mendapat *pressure* sehingga ada di antara mereka yang terpaksa angkat kaki dari kota Blangpidie menuju Sibolga dan Natal di provinsi Sumatera Utara.

Pada masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dan Demokrasi Terpimpin. Di level nasional peran ekonomi etnis Cina menjadi semakin meluas. lebih-lebih dengan adanya kebijakan Benteng yang membuat usaha lokal tidak berjalan efektif dan memacu hubungan Ali-Baba, serta terjadi persaingan dari perusahaan negara dan swasta lokal lainnya. Namun saat itu terjadi pergolakan politik. Setelah revolusi sosial yang disambung dengan DI/TII, hal ini membuat perekonomian sedikit mengalami gangguan, namun tidak mengalami stagnan

karena di pesisir barat Aceh konflik tersebut tidak terlalu berlarut-larut sehingga pedagang Cina masih diberi toleransi dalam perdagangan di sana, meskipun sempat tersebar isu terhadap akan adanya pengusiran Cina dari Aceh ke Sumatera Utara.

3. Perdagangan Periode 1959-1966

Perilaku perdagangan etnis Cina semakin menonjol pada periode ini, terlebih pada tahun 1957 sampai tahun 1958. Di Blangpidie mulai muncul pedagang Cina yang sangat dikenal saat itu, seperti Asan Ko. Pengusaha ini bergerak di bidang ekspor dan impor hasil bumi serta barang-barang lainnya.⁸

Selain itu keberhasilan pengusaha dan pedagang Cina mengambil alih perusahaan-perusahaan besar milik Belanda yang dinasionalisasikan. Namun kemudian kondisi politik dan ekonomi Indonesia tidak menguntungkan mereka, apalagi setelah terjadinya peristiwa G30S/PKI tahun 1965.

Pada masa itu, pedagang etnis Cina kelas menengah melakukan *human capital* besar-besaran, sehingga pada

⁸ Wawancara dengan Abdur Rasyid, di Blangpidie tanggal 20 April 2008.

saat terjadi inflasi tinggi dan perasaan anti-etnis Cina menjadi menyebar luas hingga tahun 1966. Namun pedagang Cina masih tetap dapat bertahan di kota ini. Hal tersebut dilakukan melalui penyediaan modal dan valuta asing yang didapat dari modal sendiri atau keluarga dan atau jaringan dengan pihak luar.

Kunci utama keberhasilan pelaku perdagangan etnis Cina bangkit kembali adalah dengan merintis kedekatan dengan pejabat pemerintah pada awal Orde Baru sebagai pembinaan hubungan secara ekonomi dan politis. Walaupun demikian orang Cina tidak banyak yang terjun secara terbuka dalam politik praktis saat itu, mereka melakukannya lewat dukungan material dan nonmaterial.

4. Perdagangan Periode 1966-1986

Pada tahun 1965 sampai tahun 1968 merupakan masa-masa di mana tindakan kekerasan terhadap etnis Cina meningkat akibat peristiwa G30S/PKI. Ada sebagian di antara mereka yang dianggap terlibat dalam aktivitas PKI (Partai Komunis Indonesia) dibantai oleh masyarakat, seperti yang terjadi pada pedagang Cina yang bernama A Cok yang dibunuh massa di sekitar jalan Perdagangan. Selain itu ada juga pedagang Cina lainnya yang bernama

Lie Kit juga meninggal akibat diangkut massa.⁹ Namun lambat-laun situasi ini oleh rezim Soeharto dapat diatasi secara gradual.

Situasi kondusif bagi pertumbuhan perekonomian kembali dirangsang oleh pemerintah Orde Baru, yang tentunya membutuhkan lebih banyak usaha, dan modal swasta. Secara kebetulan, kedua hal tersebut banyak dimiliki oleh etnis Cina dan ditunjang pula oleh kemampuan teknis dan hubungan perekonomian dengan pihak luar negara, terutama dengan sesama etnis Cina di luar negara. Akibatnya, kebanyakan etnis Cina mengalami peningkatan status sosial ekonomi daripada kondisi sebelumnya. Namun demikian, mereka masih dikesampingkan dari usaha-usaha perekonomian utama, dan masih terdiskriminasi untuk memasuki TNI dan Polri, administrasi sipil pemerintah dan perguruan tinggi negeri.

Dampak dari perlakuan diskriminatif ini adalah terjadinya pembagian kerja yang bersifat pribumi dan nonpribumi. Perubahan peran ini cenderung menghambat kerjasama ekonomi yang lebih kuat sejak pasca perang kemerdekaan Republik Indonesia. Etnis Cina akhirnya

⁹Wawancara dengan Nurhayat, di Blangpidie pada tanggal 22 April 2009

lambat laun mengganti identitasnya menjadi identitas Indonesia, terutama disebabkan atas alasan peran perdagangan mereka.¹⁰

Munculnya perusahaan-perusahaan yang dikuasai etnis Cina berdampak negatif, dengan tidak dilibatkannya pengusaha lokal untuk bekerjasama dalam korporatisasi perusahaan-perusahaan. Efek negatif yang muncul adalah semakin tajamnya persaingan usaha lokal dan nonlokal. Akibat ketimpangan ini di Blangpidie pernah muncul demonstrasi massa besar-besaran pada tahun 1982,¹¹ yang menghancurkan puluhan toko dan usaha-usaha lainnya milik etnis Cina di kota ini. Kerusuhan sehari ini mengakibatkan kerugian materi yang sangat besar bagi etnis Cina. Namun sehari setelah itu, pihak keamanan dari Kepolisian dan TNI turun tangan dan berhasil menangkap beberapa orang yang diduga sebagai perusuh. Meskipun tidak ada jatuh korban jiwa, namun peristiwa seperti ini merupakan hal yang harus selalu diwaspadai sebagai *social latent conflict* yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi tanpa bisa diprediksi sebelumnya.

¹⁰*Ibid*, hlm 327-328

¹¹Wawancara dengan Suryadi di Blangpidie, pada tanggal 23 April 2009

B. Perdagangan Era Daratan

1. Perdagangan Periode 1986-1999

Pada tataran nasional masa ini merupakan masa keemasan dalam perdagangan dan bisnis etnis Cina di Indonesia, terlebih lagi mereka yang "dekat" dengan kekuasaan dan penguasa. Pada tataran lokal di Blangpidie perdagangan Cina pada masa ini sedang mengalami masa kejayaan setelah jalur darat dan jembatan-jembatan selesai dibangun oleh kontraktor Jerman. Distribusi barang dan jasa dari kota Blangpidie ke Medan Sumatera Utara dan sebaliknya yang menjadi menaikkan ritme lintas perdagangan di kota yang dijuluki "kota dagang" di pesisir Barat Aceh ini.

Pada masa ini perdagangan etnis Cina berkembang pesat dan mereka semakin mendominasi perdagangan terutama di jalan protokol di kota ini seperti di jalan Perdagangan, jalan Sentral, jalan Persada, dan jalan Pahlawan yang dikuasai oleh para pedagang emas etnis Cina.

Selain itu di sekitar jalan Pasar Ikan Lama dan jalan At-Taqwa juga berdiri industri minuman seperti pabrik limun Suryani dan Sakura. Selain itu, mereka juga menguasai pangsa pasar kelontong, seperti toko Nusantara, Toko Bali, Toko Jogja, dan lain-lain. Hasil bumi dikuasai oleh A Si, tekstil dikuasai A Tong, dan jasa pengangkutan seperti SDR (Saudara) dan pengangkutan Persada dan lain sebagainya. Selain itu, mereka juga menguasai bisnis pengolahan kayu (panglong) dan menjadi pemegang beberapa HPH di sekitar Aceh Selatan dan Aceh Barat, seperti Cun Pong. Selain itu, mereka juga merintis perkebunan sawit dan karet di daerah Seumayam dan Nagan Raya.¹²

Etnis Cina mengokohkan diri sebagai salah satu pilar penyangga pertumbuhan perdagangan di Blangpidie. Keberanian pengusaha dan pelaku ekonomi etnis Cina lainnya dalam penanaman modal, spekulasi, strategi kerjasama dan jaringan kerja dengan pihak lain menjadi poin istimewa perilaku perdagangan etnis Cina. Namun kedekatan dengan pejabat, bahkan sampai ke hal-hal pribadi cenderung dihubungkan dengan kolusi, korupsi

¹²Wawancara dengan Zulfikar di Blangpidie, 25 April 2008

dan nepotisme dan itu juga dilakukan oleh beberapa pengusaha etnis Cina pada tataran nasional. Akan tetapi, pembangunan ekonomi dan keamanan hidup yang didengungkan dan dibanggakan Orde Baru, bagai menara gading yang dasar konstruksinya tidak kuat, maka terjadi keruntuhan rezim dan keamanan hidup yang menyakitkan dengan adanya ketimpangan ekonomi pada tahun 1998, namun hal ini tidak begitu kentara terjadi di Blangpidie. Sentimen pasar hanya terjadi sesaat, namun kemudian stabil kembali.

Kerusuhan pada bulan Mei 1998 di Jakarta tidak merembes ke Aceh Barat Daya, khususnya Blangpidie. Kerusakan berupa penghancuran toko-toko serta pusat perdagangan terutama yang dimiliki oleh etnis Cina di Jakarta tidak terjadi di kota ini.

Namun, kondisi politik pada tataran nasional, ikut mendorong jatuhnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan. Saat itu, usaha-usaha perdagangan etnis Cina di kota-kota besar banyak yang vakum, dan baru mulai bangkit setelah adanya jaminan keamanan dari mantan Presiden Habibie. Saat itu para pelaku ekonomi etnis Cina hanya menunggu perkembangan keadaan. Di

Blangpidie pada masa ini, mereka masih tetap aktif melakukan usahanya tanpa ada gangguan yang berarti dari etnis lainnya yang ada di kota ini.

2. Perdagangan Periode 1999-2001

Kondisi perdagangan Cina di Aceh Barat Daya pada masa ini memasuki kurun waktu konflik terbuka antara GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dengan pemerintah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang mulai merambahi pantai Barat Aceh. Kondisi ini terjadi setelah terjadinya eskalasi kekerasan pasca tuntutan referendum yang didengungkan mahasiswa yang didukung oleh masyarakat Aceh. Akibatnya Aceh tenggelam dalam suasana konflik.

Pada masa ini gairah perdagangan sangat terganggu karena seringnya terjadi pembakaran truk angkutan dan barang dagangan di lintas jalan raya antara Blangpidie ke Medan dan sebaliknya oleh OTK (Orang Tak Dikenal) dan juga memasuki biaya transportasi yang sangat tinggi di mana biaya pengangkutan barang dari Aceh Barat Daya ke Sumatera Utara dan sebaliknya pernah mencapai angka 1000 rupiah per kilogram.

Pada masa terjadi lagi peristiwa kebakaran besar yang menghancurkan sebagian besar toko-toko pedagang etnis Cina di kota ini. Hal ini juga telah merubah wajah kota Blangpidie menjadi "kota ruko" yang semakin mengokohkan eksistensi tabalan "kota dagang" sekaligus mengusahakan wallet pada lantai 3 (tiga) atau 4 (empat) di rumah toko mereka.¹³

C. Perdagangan Kontemporer

1. Perdagangan Masa Sebelum Menjadi Ibukota Kabupaten Otonom

Sebelum diresmikan menjadi ibukota kabupaten Aceh Barat Daya pada 17 April 2002 dengan Undang-Undang No.4/Tahun 2002, ibukota Aceh Barat Daya, yaitu Blangpidie hanyalah ibukota Kecamatan dalam struktur pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan. Selain sebagai pusat kecamatan, juga sebagai kota Pembantu Bupati Wilayah Aceh Barat Daya di kota Blangpidie. Kota ini dikenal pula sebagai kota dagang, predikat ini disandang karena letak kecamatan berpenduduk 23.000 jiwa ini sangat strategis, terutama dalam siklus barang dan jasa. Kota ini berada di tengah dari wilayah dari sembilan

¹³ Wawancara dengan Anthony di Blangpidie pada tanggal 22 April 2009

kecamatan, yaitu Kuala Batee, Susoh, Blangpidie, Tangan-Tangan, Manggeng.

Ditinjau dari sektor hubungan ke luar daerah, letak kota Blangpidie juga sangat menguntungkan. Kota ini berada di antara Kota Tapaktuan, ibukota Kabupaten Aceh Selatan dan kota Meulaboh, ibukota Aceh Barat. Kota Blangpidie terkenal dengan produksi beras atau *Breuh Sigupai*. Kota ini berjarak tempuh 77 kilometer arah Barat Tapaktuan dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam perjalanan dengan kendaraan umum. Sedangkan dari arah Meulaboh ibukota Aceh Barat, dapat ditempuh dengan jarak 120 Kilometer ke arah Selatan dengan waktu sekitar 2,5 jam dengan bus umum.

Posisi yang sangat strategis ini menjadikan kota Blangpidie, Aceh Barat Daya sangat aksesibiliti atau mudah dijangkau oleh masyarakat yang berdomisili kecamatan-kecamatan dan kabupaten lain. Itulah sebabnya, pedagang Cina dapat bertahan di kota ini, walaupun kota ini sangat rentan terhadap kebakaran karena kontruksi bangunannya rata-rata semipermanen dan kayu.

Selain itu, Aceh Barat Daya sebelumnya dikenal sebagai sentral perdagangan hasil pertanian, terutama

produksi unggulan Kabupaten Aceh Selatan, seperti kacang tanah, pala, sawit, kakao, karet dan minyak nilam. Selain itu kota ini juga dikenal sebagai daerah pemasaran gabah, karena wilayah Aceh Barat Daya sudah lama pula dikenal sebagai lumbung padi (*breueh sigupai*).

Dalam perkembangan perdagangan di kota Blangpidie, Aceh Barat Daya kota ini bukan saja menjadi sentral perdagangan terbatas dalam kabupatennya, melainkan mampu menempatkan diri sebagai daerah pemasok bahan kebutuhan masyarakat kabupaten Aceh Selatan, termasuk daerah Singkil, terutama sebelum dibuka jalan tembus menuju Medan, Sumatera Utara.

Selain itu, kota ini terdapat dua lembaga perbankan yang sangat stabil, yaitu Bank BRI Cabang Blangpidie beroperasi secara baik dalam mobilitas keuangan dari daerah ini. Setelah itu beroperasi pula Bank BPD Aceh Cabang Blangpidie sehingga ada dua lembaga keuangan di sana sehingga semakin memperkokoh eksistensi Blangpidie sebagai kota dagang di Aceh Selatan saat itu.

Para pedagang Cina dan pedagang setempat memanfaatkan jasa kedua lembaga perbankan tersebut dalam pengembangan usahanya terutama dalam proses

transfer uang ke Medan dan kota-kota lainnya demi kelancaran distribusi barang dari Medan. Selain itu, “kota ruko” yang dihuni pedagang termasuk etnis Cina itu, juga menjadi lokasi Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Wilayah III Blangpidie di Pulau Kayu, Susoh. Sedangkan kantor pemerintah setingkat lebih tinggi, yang kini berada di Blangpidie, seperti Kantor Depo Logistik Cabang VII Perwakilan Tapaktuan, dan Kantor Kejaksaan Negeri (Kajari) di Blangpidie.

Usaha perdagangan di Blangpidie dari hari ke hari berkembang semakin pesat, terutama usaha pertokoan yang menyediakan bahan kebutuhan masyarakat, termasuk industri pengolahan kayu, minyak pala, minyak nilam, termasuk usaha penggilingan padi. Malahan di Pulau Kayu, Susoh, tetangga kecamatan Blangpidie, beroperasi dua unit pabrik *molding* milik Cina dan Pribumi, yaitu pabrik pengawet kayu olahan terbesar di bawah bendera usaha, PT. ACIP dan PT. DPL.

Dalam upaya meningkatkan produksi pertanian telah pula beroperasi irigasi teknis di Kutatinggi yang mampu menyuplai kebutuhan air sawah ribuan hektar

mencakup kecamatan Susoh dan sebagian areal sawah di kecamatan Tangan-Tangan.

Sebagaimana kota dagang di daerah lain, barang dan bahan kebutuhan masyarakat yang diperdagangkan di kota Blangpidie sangat beragam, yang disesuaikan dengan selera pasar. Kelengkapan kebutuhan pokok, pakaian, bahan bangunan, took emas dan perhiasan, mobiler rumah tangga, tidak kecuali usaha dealer sepeda motor berkembang pesat, seiring masuk beragam *brand market* kendaraan bermotor produksi luar negeri belakangan ini.

Masyarakat dari Kabupaten Aceh Selatan dan Nagan Raya lebih tertarik membelanjakan bahan makanan dan barang kebutuhan di Blangpidie, Aceh Barat Daya sehingga pasar Blangpidie bukan saja dikunjungi masyarakat lokal, melainkan kostumer dari luar wilayahnya. Masyarakat dan pegawai yang berdomisili di luar kota Blangpidie Aceh Barat Daya biasanya memanfaatkan hari libur dan hari minggu untuk meluangkan waktu bersama keluarga berbelanja berbagai barang kebutuhan di kota ini.

Perkembangan perdagangan di kota Blangpidie tidak sempat terganggu meskipun pernah terbakar berkali-

kali dalam sejarahnya bahkan perkembangannya yang semakin bertambah pesat sejak dilakukan renovasi pertokoan pascakebakaran besar yang sempat melanda kota ini pada tahun 2001. Pertokoan dan penginapan yang sebelumnya hanya terkonsentrasi di kawasan kota, seperti kawasan Jalan Persada, Jalan Selamat, Jalan Perdagangan, dan Jalan Sentral, dan kini bahkan tumbuh menjamur hingga di kawasan Jalan Pasar Baru, Jalan Haji Ilyas, Jalan At-Taqwa, Jalan Pendidikan, termasuk Jalan Kesehatan (depan Mesjid Jamik), tidak terkecuali Jalan Pasar Lama, sampai ke jalan Iskandar Muda.

Perkembangan pertumbuhan kawasan perdagangan baru ini sangat ditentukan oleh pembangunan toko permanen secara besar-besaran oleh para investor lokal baik dari etnis Cina maupun pribumi. Pertumbuhan itu, menyebabkan peningkatan ruas jalan dalam kota, termasuk pembangunan jembatan kerangka baja di atas aliran Krueng Beukah yang menghubungkan kota Blangpidie dengan kemukiman Guhang. Jalan tembus tersebut sekaligus merupakan jalur alternatif menuju kecamatan Kuala Batee dan Meulaboh.

Di samping itu, sejak mulainya beroperasi pelabuhan penyeberangan feri di Labuhan Haji selama beberapa tahun terakhir turut membawa andil besar dalam mempercepat pertumbuhan perekonomian dan perdagangan di kota Blangpidie. Masyarakat dari dan ke Sinabang kepulauan Simeulue, sebagian besar melakukan transit di penginapan dan berbelanja di kota Blangpidie.

Selain itu sejak mulai terbukanya akses jalan dari Babahrot, Kuala Batee menuju Terangon. Di mana jalur darat ini menerobos rangkaian pegunungan Bukit Barisan itu, yang memang masih terbatas dilintasi kendaraan roda empat. Begitupun, arus barang dari dua kawasan bertetangga itu saat ini mulai lancar.

Produksi tembakau dari dataran tinggi Gayo dapat dengan mudah dipasarkan di kota Blangpidie. Demikian pula hasil pertanian, seperti cabai dari Terangon Gayo Lues telah mampu melepas ketergantungan produksi cabai dari Berastagi dan Kabanjahe Sumatera Utara. Melalui jalan itu pula, barang kebutuhan pokok dari kota Blangpidie dengan mudah dapat dipasarkan ke Terangon dan Blangkejeren. Ikan basah yang diproduksi nelayan di Susoh sebelumnya dianggap mustahil dapat dipasarkan ke Terangon, Gayo

Lues, kini telah dapat dinikmati hampir setiap hari oleh masyarakat di kawasan pedalaman Aceh.

2. Perdagangan Era Kabupaten Otonom

Pertanian dan perdagangan adalah dua pilar utama penyangga struktur perekonomian Kabupaten Aceh Barat Daya. Dua lapangan usaha ini menjadi andalan ketika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 menyatakan wilayah yang terdiri atas lima Kecamatan ini resmi berpisah dari kabupaten induk Aceh Selatan. Potensi untuk pengembangan investasi merupakan dasar bagi pembangunan daerah ini, namun faktor keamanan saat itu, tidak memungkinkan untuk mendatangkan investor, membuat realisasi investasi membutuhkan waktu. Usaha untuk menggerakkan perekonomian lokal, mempersiapkan infrastruktur, dan perencanaan yang matang telah disiapkan.

Modal sebagai sentra perdagangan sejak kolonial hingga ketika masih bergabung dalam wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Walaupun saat itu Blangpidie hanyalah sebagai *zelfbestuur* dan ibukota kecamatan. Namun, dalam

perkembangannya, Blangpidie menjadi naik status menjadi ibukota kabupaten pada tahun 2002.

Barang-barang yang diperdagangkan adalah keperluan rumah tangga yang meliputi kebutuhan pokok, sandang, dan papan. Barang-barang ini selain berasal dari usaha penduduk setempat juga dipasok dari daerah lain, terutama dari Medan, Sumatera Utara. Suplai barang dan jasa di sini diminati oleh penduduk dari daerah tetangga, seperti Gayo Lues dan Aceh Selatan. Blangpidie tidak saja menjadi pusat transaksi perdagangan antarkecamatan, tetapi juga antarkabupaten.

Selain perdagangan yang banyak dilakukan penduduk, lapangan usaha yang paling banyak menggerakkan perekonomian daerah adalah pertanian. Tidak saja pertanian tanaman pangan, tetapi juga perikanan, peternakan, dan perkebunan. Tak heran, untuk pengembangan pangan, terutama padi, di Blangpidie tersedia lahan sawah seluas 16.450 hektar.

Produksi padi cenderung meningkat dan pada tahun 2003 mencapai 75.359 ton. Jumlah ini sebenarnya mencukupi kebutuhan konsumsi beras bagi penduduk di kota ini. Hanya saja perbedaan kualitas dan harga

membuat beras dari daerah lain cenderung lebih diminati penduduknya. Selain itu, pemerintah juga meluncurkan program beras miskin yang dibagikan keluarga kurang mampu juga banyak beredar. Produksi padi yang cukup tinggi di daerah ini disebabkan sistem penanaman padi di sawah sudah dilengkapi irigasi teknis, seperti di Kecamatan Babahrot dan Tangan-tangan. Sedangkan kecamatan-kecamatan lainnya masih menggunakan irigasi setengah teknis dan sederhana.

Perencanaan pembangunan selain perdagangan Aceh Barat Daya, kini menggalakkan penanaman padi bersama tanaman pangan lain, seperti kacang hijau, kacang tanah, ketela pohon, dan pisang, yang ditetapkan sebagai komoditas yang akan dipacu produktivitasnya untuk program agropolitan.

Sedangkan komoditi lain, kelompok tanaman hortikultura yang ingin dikembangkan, antara lain, mangga, durian, kuini, dan rambutan. Di sektor perkebunan, komoditas pala, kelapa sawit, dan karet diandalkan dalam pengembangan agropolitan. Kegiatan agropolitan ini akan dikonsentrasikan di kecamatan Manggeng dan Tangan-tangan.

Pembangunan dan pengembangan bidang perikanan, terutama dari laut, dinilai lebih memungkinkan. Sebab, sembilan kecamatan di Aceh Barat Daya yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia dengan garis pantai sepanjang 65 kilometer. Selama ini hasil tangkapan nelayan hanya berkisar pada 5.000-6.000 ton/tahun. Jumlah yang relatif kecil dibanding perolehan nelayan lain di wilayah pesisir pantai Samudera Indonesia. Fasilitas yang kurang seperti perahu dan alat tangkap yang masih sangat sederhana, dianggap sebagai salah satu yang menjadi kendala dalam peningkatan ekonomi di Aceh Barat Daya.

Produksi perikanan laut daerah ini menyusut dibandingkan masa-masa sebelum krisis ekonomi melanda. Sebelum tahun 1998, hasil tangkapan nelayan dapat mencapai 5-10 kali lipat. Produksi ini pun tidak hanya untuk konsumsi penduduk lokal, tetapi juga diperdagangkan ke daerah lain, seperti Nagan Raya dan Medan. Profesi nelayan tidak dapat diandalkan untuk memperoleh penghasilan yang lebih layak sehingga banyak nelayan yang kemudian beralih profesi menjadi pedagang karena usaha ini dianggap lebih menguntungkan.

Secara umum, setiap kecamatan telah memiliki peruntukan kegiatan perekonomian masing-masing, sesuai dengan karakter daerah yang dimiliki. Blangpidie menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan. Kecamatan Susoh menjadi sentra pengembangan sektor kelautan. Kecamatan Manggeng dan Tangan-tangan sebagai pusat agropolitan. Kecamatan Kuala Batee dan Babahrot akan diarahkan sebagai sentra agroindustri dan peternakan terpadu.

Pembangunan perdagangan dan ekonomi dapat ditopang oleh realisasi keberhasilan program pengembangan pusat-pusat kegiatan bisnis dan aksesibilitas antarkawasan atau kecamatan di kabupaten ini. Hal ini dianggap penting, apalagi sekitar 90% penduduk menetap di daerah pemukiman.

Sarana perhubungan darat yang saat ini ada ditinjau dari statusnya adalah jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Jalan-jalan yang kondisinya termasuk kategori sedang sampai dengan kategori baik, diperkirakan sekitar 30 persen, selebihnya dalam kondisi memprihatinkan akibat tidak terurus selama konflik Aceh. Jalan-jalan di kecamatan dan hubungan darat antardesa (*gampong*) juga masih sangat minim.

Seiring dengan hal tersebut, berdasarkan pertimbangan keadaan administratif, luas wilayah, kependudukan, keadaan fisik wilayah, sarana dan prasarana ekonomi, jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya. Maka dilakukan pemekaran sehingga menjadi 12 kecamatan, yang dimulai sejak tahun 2004.

Ketika terjadinya gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh pada tanggal 26 Desember 2004, semua aktivitas pembangunan dan perdagangan terhenti. Peristiwa ini meluluhlantakkan sebagian besar pesisir Aceh serta membuat perekonomian masyarakat mengalami stagnan. Namun lambat-laun mulai pulih kembali setelah banyaknya donatur asing yang membantu Aceh bangkit dari keterpurukan. Di sinilah kebangkitan kembali perekonomian dan perdagangan di seluruh Aceh.

Sejak dicetuskan *Memorandum of Understanding* antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada 18 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia, keadaan perekonomian di Aceh semakin membaik setelah semakin kondusifnya status keamanan di Aceh. Hal ini juga mengakibatkan turun kembali *cost* yang harus dikeluarkan

khususnya dalam pengangkutan transportasi barang dan jasa dari Blangpidie ke Medan dan sebaliknya melalui lintas daratan sehingga harga barang kembali stabil.

Saat ini pedagang Cina di Blangpidie telah mampu membuat suatu jaringan perdagangan yang sehat di kota Blangpidie dengan banyaknya muncul *toke-toke* lokal hasil tempaan ala mereka.¹⁴ Di antara mereka banyak yang sudah sukses menjadi *toke-toke* lokal yang bergerak dalam bidang jasa pengangkutan barang dan perdagangan grosir dan eceran kelontong. Namun dalam bidang perdagangan emas dan bahan bangunan pedagang Cina masih mendominasi dibandingkan pedagang lokal.

Selain itu pedagang Cina di Aceh Barat Daya selain berdagang juga mengusahakan burung walet di lantai tiga dan empat ruko mereka. Hal ini juga mulai dipelajari oleh pedagang lokal di Aceh Barat Daya.

Sampai saat ini pedagang dari etnis Cina dan lokal dapat berdampingan dalam perdagangannya di kota Blangpidie Aceh Barat Daya. Harmonisasi dalam

¹⁴Di antara *toke-toke* tersebut yang paling berhasil adalah H.Ilyas dan Toke Zakaria yang sekarang menjadi "penguasa" perdagangan klontong di Blangpidie. Mereka juga memiliki jaringan bisnis lainnya seperti bisnis pengangkutan dan pembelian hasil bumi.

perdagangan ini terlihat di dalam keseharian mereka dalam melakukan aktivitas masing-masing dengan pangsa pasar tersendiri pula.

Di antara mereka juga sering bekerjasama dalam hal-hal sosial kemasyarakatan di lingkungan mereka. Keberadaan pedagang Cina di kota kecil ini merupakan fenomena yang menarik, karena biasanya pedagang Cina berkonsentrasi di kota-kota besar. Selain itu, mereka juga tidak membangun rumah ibadah dan hanya melakukan peribadatan dan persembahyangan di rumah toko mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perilaku perdagangan etnis Cina di Indonesia sepanjang periode tahun 1900 sampai 2008 masih dibumbui oleh berbagai stereotipe miring menyangkut peranan mereka di Indonesia. *Pertama* karena kebobrokan ekonomi Indonesia akibatnya banyak dana yang dibawa pengusaha Cina ke luar negeri. *Kedua* kolusi dan nepotisme menjadi kebiasaan pengusaha Cina yang mempengaruhi kinerja birokrat. Di Indonesia, mereka adalah minoritas dari jumlah total penduduk Indonesia, tetapi ternyata mereka diperkirakan dapat mengendalikan sistem perekonomian di Indonesia.

Etnis Cina di Aceh Barat Daya di kota Blangpidie menjadi salah satu masyarakat keturunan di perantauan yang telah hidup dan tinggal di luar negara asalnya. Jaringan kerja etnis ini di kota ini mulai teridentifikasi sejak tahun 1900 dan mulai terlihat aktif dalam kegiatan perdagangan sejak tahun 1930-an, namun ternyata sampai saat ini pun mereka masih dapat bertahan.

Semenjak sistem kapitalisasi berhasil ditanamkan pengaruhnya di Aceh oleh kolonial Belanda, maka sejak itu pula terjadi peralihan aktivitas dari etnis Cina menjadi sebagai pedagang perantara. Keuletan dan keluwesannya mereka dalam perdagangan dan menghadapi penguasa membuat kelompok minoritas ini dapat mempertahankan eksistensinya dalam segala dinamika politis pada tataran nasional dan lokal.

Pada tahun 1980-an, menguatnya jaringan-jaringan perdagangan lintas daerah setelah terbukanya jalur darat di pesisir barat Aceh yang sekaligus membuka selubung isolasi distribusi barang dan jasa di sana. Pada masa ini etnik Cina di Aceh Barat Daya mulai merasakan adanya geliat perekonomian Indonesia yang terasa sejak masa Orde Baru. Pada masa itu, di pesisir timur Aceh sedang terjadi konflik antara Gerakan Separatis Aceh. Saat itu kebijakan pemerintah pusat membuat pesisir timur Aceh diberlakukan sebagai Daerah Operasi Militer sampai tahun 1998. Namun hal ini tidak terjadi di pesisir barat Aceh yang membuat daerah ini sangat kondusif pertumbuhan perekonomiannya.

Keistimewaan perilaku perdagangan etnis Cina di Aceh Barat Daya adalah; *Pertama*, teridentifikasi pada kekuatan sistem jaringan kerja yang mereka buat, walaupun demikian sikap kompetitif antara mereka tetap terpelihara secara sehat. Hal ini semakin memperkuat kinerja bisnis di kalangan mereka. Bahkan saat terjadi krisis ataupun munculnya tantangan besar, mereka akan saling bekerjasama. Oleh sebab itu bisnis keluarga menjadi salah satu ciri jaringan kerja yang mereka bentuk. Demikian pula di Aceh Barat Daya, usaha kecil sampai perusahaan menengah etnis Cina banyak yang dikelola sebagai usaha keluarga.

Kedua, perilaku hubungan jaringan perdagangan di antara etnis Cina terbentuk karena pengalaman yang mereka lalui. Sesama migran etnis Cina di manapun berada saling menjaga dan membantu pendatang-pendatang baru di bumi nusantara yang mereka tempati sebagai negara harapan. Manfaat dari adanya hubungan jaringan kerja dapat memaksimalkan *contact point* untuk memperoleh informasi, pekerjaan, penyebaran berita termasuk tukar-menukar informasi, dan memperkuat dukungan psikologis di antara mereka.

Pembagian kelas etnis Cina dengan masyarakat lokal bersifat vertikal dalam artian sebagai sikap primordial, akibat tanggapan bahwa etnis Cina dianggap kelompok minoritas. Kompetisi antar-pedagang Cina terutama sebagai pengusaha atau wiraswastawan dengan masyarakat lokal sering menjadi penyebab konflik tertutup maupun terbuka terhadap etnis ini.

Hubungan jaringan perdagangan antaretnis Cina di Aceh Barat Daya, menguatkan psikis anggotanya melalui hubungan bisnis dan sebagainya. Selain itu hubungan jaringan ini berfungsi sebagai mediator toleransi antaretnis Cina dengan masyarakat, terutama dalam hubungan perdagangan.

Kuatnya hubungan jaringan perdagangan etnis Cina di Aceh Barat Daya, ini semakin meningkatkan kekuatan usaha etnis Cina. Situasi dan kondisi ini mendorong usahawan etnis Cina mendirikan usahanya sampai ke wilayah pelosok *gampong*.

Namun, kondisi ini tidak memancing konflik usaha dengan pengusaha lokal, justru dominasi pengusaha etnis Cina pada sektor-sektor kehidupan ekonomi yang lebih penting di kota Blangpidie yang menjadi salah satu

penyebab saingan keras dengan pedagang atau pengusaha lokal kelas menengah.

Kecenderungan dalam penanaman modal jangka panjang di negara yang mereka tempati mendukung integrasi dengan komunitas lokal. Hal ini dibuktikan di Aceh Barat Daya, bahwa etnis Cina dapat berbahasa lokal Aceh dan bahasa Aneuk Jamee yang berdampingan hidupnya.

Meskipun mereka menjalankan integrasi lokal, dalam beberapa kehidupan keseharian mereka, terutama yang belum atau tidak melakukan pernikahan asimilasi dengan masyarakat lokal, tetap mempertahankan kemampuan baca dan berbicara bahasa mereka. Etnis Cina yang tidak atau belum berasimilasi melalui perkawinan dengan masyarakat lokal, biasanya hanya mengikuti kebiasaan-kebiasaan kultur mereka, terutama dalam hal makanan dan pemujaan leluhur.

Karakteristik lain yang dimiliki pedagang Cina di Aceh Barat Daya adalah kemauan kerja kerasnya dan kebiasaan hidup hemat. Mereka mampu bekerja dalam waktu yang panjang dan jarang beristirahat, kecuali untuk hari besar mereka. Mereka senantiasa menghasilkan uang,

yang sudah menjadi kebiasaan sekaligus kesenangan mereka.

Salah satu kesamaan karakteristik antara etnis Cina dengan masyarakat lokal berkaitan dengan konflik adalah sama-sama lebih menyukai penyelesaian perbedaan melalui negosiasi, dibandingkan pemecahan konflik secara formal. Hal ini terlihat dari kentalnya jaringan kerja yang telah menjadi kebiasaan etnis Cina, tentunya kondisi ini menjawab mengapa *guan xi* atau kongsi yang istilah lokal *meukonsi* menjadi penting dalam perilaku perdagangan yang dilakukan.

Kekuatan kecenderungan asimilasi bergantung pada keadaan daerah setempat dan faktor sosio-budaya, bukan pada kualitas yang ada pada diri etnis Cina. Hal ini akibat kolonialisme Belanda yang melakukan pembagian kelas warganegara Hindia Belanda, memosisikan etnis Cina berada di atas bangsa Indonesia, mengakibatkan terjadi kelambanan identifikasi etnis Cina terhadap lokal pada saat pasca kolonialisme Belanda.

Proses identifikasi penuh etnis Cina sebagai *ureung Aceh* atau Orang Aceh dan Indonesia mengalami hambatan diskriminasi politik, ekonomi dan sosial, namun

solusi asimilasi sosio-budaya bukan merupakan jawaban kunci dari permasalahan. Hambatan-hambatan ini menjadi alasan mengapa beberapa pelaku ekonomi dari kalangan etnis Cina mengarahkan investasi bisnisnya ke luar daerah, yang intinya mencari keamanan untuk perdagangan dan kelangsungan kehidupan mereka.

Sebagian besar perusahaan perdagangan keluarga berfungsi sebagai inti perusahaan pemodal, walaupun kini tingkatan manajernya bertumpu pada profesionalitas manajer dan pekerja, tetapi tidak meminimalisasi peran pemilik usaha keluarga tersebut. Ciri perilaku perdagangan etnis Cina ini terlihat dalam komposisi staf dalam perusahaannya, di mana jabatan pengambil keputusan berada di tangan kolega etnis Cina atau anggota keluarga yang dipercaya.

Pada tataran nasional, karakteristik ini semakin memperkecil kecenderungan asimilasi penuh etnis Cina pada masa mendatang. Adalah hal yang menarik, bahwa adanya hubungan percukongan yang semakin menjamur dan semakin meningkatnya kejayaan perilaku ekonomi di kalangan etnis Cina semasa Orde Baru.

munculnya beberapa faktor perkembangan perdagangan mereka di pasar dunia.

Selain itu faktor politik, faktor sosial budaya yang melingkupi etnik Cina dalam lintas perdagangan pada tataran lokal merupakan variabel-variabel yang saling berhubungan dalam menentukan lalu lintas perdagangan Aceh Barat Daya di kota Blangpidie pada masa mendatang sebagai salah satu mata rantai perdagangan antardaerah dan antarprovinsi di pesisir Barat Aceh. Semua faktor ini harus diperhatikan dan disesuaikan oleh pembuat kebijakan di daerah dengan melihat perkembangan zaman demi terciptanya harmonisasi ekonomi di Aceh Barat Daya sebagai salah satu pusat perdagangan di pesisir Barat Aceh.

Demikian juga dengan lintas perdagangan barang dan jasa harus terus ditingkatkan dan dikembangkan di daerah ini sehingga selain dapat menjadi pusat perdagangan, Aceh Barat Daya diharapkan muncul sebagai pusat perekonomian yang diperhitungkan di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kebijakan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1959.
Peraturan ini menetapkan bahwa usaha kecil milik orang asing di tingkat desa tidak diizinkan lagi setelah tanggal 31 Desember 1959.
2. Keputusan Presiden Kabinet No.127/U/KEP/12/1966.
Tentang masalah penggantian nama.
3. Instruksi Presidium Kabinet No.37/U/IV/6/1967.
Tentang Kebijakan Pokok Penyelesaian Masalah Cina yang wujudnya dibentuk dalam Badan Koordinasi Masalah Cina, yaitu sebuah unit khusus di lingkungan BAKIN.
4. Surat Edaran Presidium Kabinet RI No.SE-06/PresKab/6/1967.
Tentang kebijakan pokok WNI keturunan asing yang mencakup pembinaan WNI keturunan asing melalui proses asimilasi terutama untuk mencegah terjadinya kehidupan eksklusif rasial, serta adanya anjuran supaya WNI keturunan asing yang masih menggunakan nama Cina diganti dengan nama Indonesia.
5. Instruksi Presidium Kabinet No.37/U/IN/6/1967.
Tentang tempat-tempat yang disediakan untuk anak-anak WNA Cina di sekolah-sekolah nasional sebanyak 40% dan setiap kelas jumlah murid WNI harus lebih banyak daripada murid-murid WNA Cina.
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.455.2-360/1968.
Tentang penataan Kelenteng-kelenteng di Indonesia.

7. Surat Edaran Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika No.02/SE/Ditjen/PP6/K/1988.
Tentang larangan penerbitan dan pencetakan tulisan/iklan beraksen dan berbahasa Cina.
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 Tanggal 10 April 2002, Lembaran Negara No.17 Tahun 2002/Tambahan Lembaran Lembaran Negara No.4179.
Tentang pemekaran Aceh Barat Daya, dll.
9. Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004.
Tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.
Tentang Pemerintahan Aceh

B. Buku, Naskah dan Makalah

Abubakar, H.Said,

1995 *Berjuang Untuk Daerah: Otonomi Hak Azazi Insani*, Banda Aceh: Bima Utama..

Ahmad, Zakaria,

1972 *Sekitar Kerajaan Aceh Tahun 1520-1675*, Medan: Monora.

1990 *Geografi Budaya Aceh Selatan*, Seminar Kebudayaan Aceh Selatan di Tapaktuan, 1990.

Ankersmit, F.R.,

1987 *Refleksi Tentang Sejarah*, Terj.Dick Hartoko, Jakarta : Gramedia

Booth, Anne, ed.

1988 *Sejarah Ekonomi Indonesia*, Jakarta : LP3ES

Burger, D.H.,

1970 *Sejarah Ekonomi Sosiologis Indonesia II*,
Jakarta : Pradnya Paramita.

Chusmann, Jennifer dan Wong Gan Wu, ed.,

1991 *Perubahan Identitas Orang Cina di Asia Tenggara*, Jakarta : Grafiti Press.

Chung David.C.L.,

1995 *Sukses Bisnis Cina Perantauan Latar Belakang Praktek Bisnis dan Jaringan Internasional*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.

Coppel, Charles.A.,

1994 *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Dede Oetomo,

Tt *Kemultibahasaan dan Identitas Orang Cina di Indonesia*, dalam Jennifer Cushman dan Wang Gungwu, (ed), *Perubahan Identitas Orang Cina di Asia Tenggara*, Jakarta : Grafiti Press

Demereth, N. et.al.,

1967 *System, Change and Conflict*, London: Collier Mc.Millan

Djalal, B.B.,

1972 *Peristiwa Teuku Raja Tampok*, Susoh: Naskah Ketikan.

Doup, A.,

tt *Beknopt Overzicht van de Krijgsgeschiedenis van Tapaktuan en de Zuidelijk Achehsche Landschappen Korps Marscechausse Atjeh*, April, 2, 1890-1940.tp.

- Emil Salim,
1983 *Membina Keselarasan Antara Pribumi-Nonpribumi, Harian Merdeka, tanggal 14-15 Desember 1983, dalam Junus Yahya (ed), Nonpribumi di Mata Pribumi, Jakarta : Yayasan Tunas Bangsa.*
- Gottschalk, Louis,
1975 *Mengerti Sejarah, Terj. Nugroho Nutosusanto, Cet.5, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988.*
- G.William Skinner,
1979 *Golongan Minoritas Tionghoa dalam Mely G.Tan (ed), Etnis Tionghoa Indoensia Suatu Pembinaan Kesatuan Bangsa", Jakarta : PT Gramedia*
- Handoko, T. Hani,
1996 *"Tradisi (Manajemen) Dagang Ala Tionghoa" dalam Penguasa Ekonomi dan Sukses Pengusaha Tionghoa, Yogyakarta: Lembaga Studi Realino.*
- Hidayat Z.M.,
1984 *Masyarakat dan Kebudayaan Cina di Indonesia, Bandung : Tarsito.*
- Hoffer, Erick,
1988 *Gerakan Massa, Terj. Masri Maris, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.*
- Indriani,
1999 *"Migrasi dan Kegiatan Ekonomi Suku Bangsa Cina Di Aceh Pada Masa Kolonial Belanda 1873-1930" dalam Buletin HABA, No.10/99,Banda Aceh: BKSNT*

- Irchami Sulaiman, et.al.,
1988 *Perdagangan Pengusaha Cina Perilaku Pasar*,
Jakarta : PT Utama Grafika Kita.
- John, K.Neveront,
1994 *Jaringan Masyarakat Cina*, (Jakarta : Golden
Terayon Press.
- Junus Yahya, ed,
1991 *Nonpri di Mata Pribumi*, Jakarta : Yayasan
Tunas Bangsa
- Leo Suryadinata,
1984 *Dilema Minoritas Tionghoa*, Jakarta : Grafiti
Press.
1988 *Kebudayaan Minoritas Tionghoa di Indonesia*,
Jakarta : Gramedia, 1988
- Liem Twan Djie,
1995 *Perdagangan Perantara : Distribusi Orang-
Orang Cina di Jawa Suatu Studi Ekonomi*,
Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Mackie, J.A.C.
1991 *Peran Ekonomi dan Identitas Etnis Cina
Indonesia dan Muangthai dalam Wang Gung
Wu dan Jennifer Cushman, Perubahan
Identitas Orang Cina di Asia Tenggara*, Jakarta:
Pustaka Utama Grafika,.
- Mely G. Tan,
1981 *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia : Suatu
Masalah Pembinaan Bangsa*, Jakarta :
Gramedia.

- Mulder, Niel,
1986 *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional*
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Naisbitt, J.
1997 *Megatrends Asia*. New York: Touchstone
Rockefeller Center.
- Purwanto, Bambang,
1997 "Migrasi dan Kesempatan Kerja: Persoalan
Tenaga Kerja dalam Perkebunan Karet,
kumpulan Makalah Kongres Sejarah Nasional:
Dinamika Sosial Ekonomi III, Jakarta:
Depdikbud.
- Puspa Vasanty,
1976 *Kebudayaan Orang Tionghoa Indonesia*, dalam
Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di
Indonesia*, Jakarta: Jambatan.
- Robbins, S. P.
1991 *Organizational Behavior*, New Jersey:
Prentice-Hall.
- Said, Muhammad.
1961 *Aceh Sepanjang Abad 1 dan 2*, Medan:
Waspada, 1961.
- Siswono Yudhohusodo
1995 *Warga Baru : Kasus Cina di Indonesia*, Jakarta :
Yayasan Padamu Negeri.
- Taufik Abdullah,
1980 *Sejarah Lokal di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah
Mada University Press.

van Langeen.

1888 K.F.H., *Atjeh's Westkust Metdaarbij Behoorende Kaart*, Leiden: E.J.Brill.

Vlemming, J.R.

1988 *Kongsi dan Spekulasi Jaringan Kerja Bisnis Cina*, diterj. Oleh Bob Widyahartono, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

W.D.Sukisman,

1975 *Masalah Cina di Indonesia*, Yayasan Penelitian Masalah Asia.

Yahya A.Muhaimin,

1991 *Bisnis dan Politik Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, Jakarta: LP3ES

Zainuddin, H.M.

1963 *Tarich Ateeh dan Noesantara*, Medan: Iskandar Muda, Djilid I.

C. Surat Kabar/Majalah

Kompas, *Aceh Barat Daya*, 1 April 2004

Prisma 4, 1990, hlm.18.

D. Data Informan

Nama : Abdurrasyid
Umur : 70 tahun
Pendidikan : SPG
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Kutatinggi, Blangpidie

Nama : Anthony
Umur : 34 tahun
Pekerjaan : Pedagang Elektronika
Pendidikan : SMA
Alamat : Jalan Perdagangan Blangpidie

Nama : A Nyi
Umur : 67 tahun
Pekerjaan : Pedagang Emas
Pendidikan : -
Alamat : Jalan Perdagangan Blangpidie

Nama : A Polem
Pekerjaan : Elektrik dan Elektronik
Umur : 35 tahun
Alamat : Jalan Perdagangan Blangpidie

Nama : A Si
Pekerjaan : Pengepul/Pembeli Hasil Bumi
Pendidikan : -
Umur : 68 tahun
Alamat : Jalan Pahlawan Blangpidie

Nama : A Tong
Pekerjaan : pedagang tekstil tahun 1980-an
Pendidikan : SD
Umur : 69 tahun.
Alamat : Jalan Perdagangan Blangpidie

Nama : H. Ilyas
Pekerjaan : Pedagang klontong
Pendidikan : SD
Umur : 45 tahun
Alamat : Pasar Baru Blangpidie

Nama : Nurhayat
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S-1 FKIP
Umur : 50 tahun
Alamat : Kutatuha, Blangpidie

Nama : Kamarusyid
Pekerjaan : Pedagang Pecah Belah
Pendidikan : SD
Umur : 55 tahun.
Alamat : Jalan Selamat Blangpidie

Nama : Safrizal
Pekerjaan : mantan aktivis kepemudaan
Pendidikan : SMA
Umur : 50 tahun
Alamat : Jalan Selamat Blangpidie

Nama : Suryadi
Pekerjaan : Mantan aktivis kepemudaan
Pendidikan : SMA
Umur : 42 tahun
Alamat : Jalan Manyang Meudang Ara

Nama : Zulfikar
Pekerjaan : Pedagang pecah-belah
Pendidikan : SD
Umur : 50 tahun
Alamat : Jalan Selamat Blangpidie